

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan secara rinci mengenai konsep dan pemahaman dasar yang akan dipakai pada pembahasan. Dimulai dengan membahas mengenai politik, konsep pemikiran politik, konsep pemikiran Machiavelli, gagasan Machiavelli mengenai kekuasaan dan negara, prinsip amoralitas Machiavelli, Politik Indonesia pada masa Soeharto dan macam-macam gaya kepemimpinan.

2.1.1 Pengertian Politik

Pada buku *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Noer (1983, p. 79) mengungkapkan bahwa: "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat."

Menurut definisi diatas, dapat dipahami, bahwa politik berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan maupun aktivitas sikapnya yang mencerminkan suatu pola. Politik ini bertujuan untuk mempengaruhi dan mempertahankan suatu tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kebijakan politik yang bersumber dari kekuasaan. Namun, bukan berarti kekuasaan adalah hakikatnya politik, tapi politik mau tidak mau tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Karena, kekuasaan diraih dengan cara berpolitik dan politik memerlukan kekuasaan agar dapat diimplementasikan dalam sebuah kebijakan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat (Nambo & Puluhuwa, 2015).

Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami, bahwa ada yang dimaksud dengan politik sebagai pengetahuan dan ada pula ilmu politik sebagai disiplin keilmuan. Kedua hal ini memiliki pengertian yang cukup signifikan. Karena, Menurut Mufti (2019) mengemukakan pendapat, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dapat disusun secara sistematis, metodis, umum serta objektif. Sistematis artinya setiap unsur yang berkaitan secara teratur dalam keseluruhan. Metodis yang artinya menggunakan metode, jalan, cara yang sangat lazim digunakan terhadap disiplin ilmu yang sedang dibicarakan. Umum artinya kebenaran objektifnya dapat berlaku secara umum, serta tidak mempunyai sifat yang sangat subjektif.

Berbeda ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan artinya pemahaman yang diperoleh serta dapat memproses mengetahui sesuatu, tanpa memperhatikan objek, cara serta kegunaannya. Dengan kata lain, pengetahuan tidak dapat berbicara tentang aspek epistemologis, aksiologis dan ontologis mengenai objek tertentu. Pengetahuan cenderung tak beraturan, tidak tersusun dan tercerai-berai, sementara ilmu relatif tersusun secara teratur. Ilmu dapat menambah berbagai pengetahuan, namun sebaliknya pengetahuan tidak dapat disusun secara sistematis teratur oleh ilmu.

Sedangkan definisi ilmu politik adalah ilmu pengetahuan tentang pembahasan kenegaraan atau ketatanegaraan, kaitan dengan segala urusan sistem, tindakan kebijakan yang dikeluarkan mengenai pemerintah dan bagian dari dasar-dasar pemerintahan (Mufti, 2019). Berdasarkan hal tersebut, filsafat politik dapat didefinisikan sebagai penyelidikan dan pengetahuan dengan akal budi mengenai hakikat tentang ilmu pengetahuan kenegaraan atau ketatanegaraan, adapun

kaitannya dengan segala proses dasar-dasar pemerintah, urusan sistem serta tindakan kebijakan mengenai pemerintah Negara (Madung, 2013).

Filsafat politik dan ilmu politik memiliki kesamaan dalam menyampaikan materi kajian yang bersumber dari fenomena kehidupan politik secara konkret. Namun, filsafat politik membahas segala sesuatu tentang politik dari sudut pandang filsafat. Dalam sudut pandang filsafat inilah yang membedakan filsafat politik dengan ilmu politik. Dengan hal itu filsafat politik tidak secara langsung membahas mengenai materi empiris seperti dalam kajian ilmu politik. Secara tidak langsung ilmu politik merupakan pembahasan dan kajian tentang masalah-masalah politik dari segi keilmuan untuk menentukan strategi dalam pencapaian sasaran politik.

Dengan demikian, ilmu politik yang perkembangannya di negara-negara Eropa terutama bagian timur menunjukkan adanya pendekatan tradisional dari aspek filsafat yuridis telah berlangsung sejak lama. Selanjutnya, terjadi perkembangan ilmu politik pada akhir dekade 1990 setelah runtuhnya komunisme dari pengaruh negara Uni Soviet. Maka kemudian, pembahasan ilmu politik, dapat dilakukan dengan pendekatan tradisional juga dengan pendekatan modern yang berkembang di negara barat.

Max Weber mengemukakan pendapat mengenai negara yakni:

“Negara dapat didefinisikan sebagai suatu institusi kekuasaan dalam bidang politik yang memiliki legitimasi untuk menetapkan peraturan undang-undang serta menjadi otoritas terhadap suatu masyarakat di wilayah tertentu. Undang-undang serta otoritas tersebut bersifat dapat dipaksakan kepada masyarakat” (Madung, 2013).

Salah satu tugas penting bagi negara yakni, memaksakan pelaksanaan hukum dan peraturan. Pelaksanaan hukum diperlukan karena negara merupakan

instansi yang mampu menyelesaikan adanya sebuah konflik kepentingan secara netral. Negara dapat menghukum segala bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh warganya, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mulai dari sudut pandang moral, negara berfungsi untuk menjamin keamanan, hak asasi manusia contohnya hak untuk hidup layak, mempunyai hak kebebasan dan hak memiliki (Madung, 2013).

Kesimpulan menurut Budiardjo (2008) mengenai politik yang ada kaitannya dengan konsep (*state*) negara berkaitan dengan permasalahan (*power*) kekuasaan serta (*decision making*) pengambilan keputusan lalu mengenai (*public policy*) kebijakan publik dan mengenai (*allocation or distribution*) distribusi maupun alokasi.

2.1.2 Konsep Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah gagasan politik terhadap seseorang yang terdapat didalamnya mengandung Norma serta nilai. Adapun dalam pemikiran politik terdapat gagasan-gagasan politik yang hendak diwujudkan. Ada beberapa hal tersebut yang dapat mempengaruhi pemikiran politik seseorang diantaranya yakni lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga dan keturunan.

Sedangkan, Pemikiran politik merupakan dasar dari falsafah politik (Budiardjo, 2008). Bilamana memakai sudut pandang ilmu politik, pemikiran politik itu adalah bagian dari penerapan dan cerminan para pemikir-pemikirnya. Suatu perkembangan politik dapat berkembang, karena ada seseorang yang mengimplementasikannya melalui kekuasaan. Mempelajari pemikiran politik ini,

dapat dilakukan dengan cara objektif dan subjektif. Secara objektif, pemikiran politik difokuskan pada konsep pemikiran para pemangku kekuasaan. Sedangkan, secara subjektif, pemikiran itu diteliti dengan mempelajari perilaku, Sedangkan mempelajari pemikiran politik secara subjektif adalah dengan cara mempelajari individu yang mengungkapkan pemikiran itu, hal-hal yang melatar belakangnya dan kondisi sosialnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemikiran Presiden Soeharto tidak terlepas dari pemikirannya dari perspektif masyarakat, politik, ekonomi, budaya dan agama. Dari segi sosial dengan pemikirannya tertuju pada bagaimana masyarakat Indonesia bisa menjalani kehidupan nyaman dan aman. Secara politis bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto tetap bersatu dan serta utuh tanpa gejolak politik yang sangat berlebihan. Dengan hal tersebut Indonesia yang mampu hidup secara berkecukupan dari segi ekonomi, mengembangkan konsep trilogi. Dari segi budaya, bagaimana suku bangsa di seluruh Indonesia bisa hidup seperti semboyan nasional Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika", meskipun berbeda, bisa menjadi satu Indonesia. Dari sudut pandang agama, membangun perasaan masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai sehingga dapat menerima agamanya masing-masing, dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Memang tidak mudah untuk melakukan semua ini, tetapi berkat pemikiran serius dan kerja keras para ajudan pemimpin Orde Baru, semua pencapaian ini telah di raih.

Gagasan tentang politik dan negara kita bukanlah hal baru. Memang benar gagasan ini lebih dirasakan oleh generasi yang hidup dan bermigrasi di abad ke-20, terlihat dari munculnya gerakan dan upaya untuk menegakkan kembali

kemerdekaan negara dengan melepaskan diri dari kontrol Belanda, kemudian Jepang, tetapi tidak kasus ini. Artinya, segala sesuatu dimulai dari nol. Kita juga telah mendiskusikan ide-ide yang berkaitan dengan politik, apakah dapat dirasionalisasikan atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, jauh sebelum munculnya ide-ide modern di negara kita, seperti yang digambarkan pada abad ke-20.

Adanya gagasan ini juga dapat dilihat dari adanya susunan sosial tertentu di suatu daerah, baik itu negara kecil maupun negara besar, seperti Taruma di Jawa Barat dan Kutai di Kalimantan pada abad ke-5, Melayu dan Sumatera. Di Sumatera Kalingga di Jawa, abad ke-5. Abad ke-7, Sri Wijaya pada abad ke-5-10, Maja Pahit pada abad ke-13-15, Minangkabau pada abad ke-17, Aceh pada abad ke-15-19, Malaka pada abad ke-17 dan ke-16, Banten pada abad ke-16 dan 17 dan lainnya. Sebagian besar negara yang disebutkan berada di era yang tidak mengenal orang kulit putih(Wibisono, 2020). Hal ini tidak dapat terjadi tanpa ide-ide sadar atau tidak sadar tentang politik pada umumnya dan kehidupan nasional pada khususnya.

2.1.3 Gaya Kepemimpinan Politik

Setiap seorang pemimpin memiliki ciri khas tersendiri dalam kepemimpinannya. Begitu juga dengan Presiden Soeharto pada masa kepemimpinannya terkenal dengan gaya otoriternya. Bentuk kepemimpinannya tercermin dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkannya juga seperti: adanya kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Keotoriteran Soeharto ini berasal dari latar belakangnya yaitu dari militer.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto menduduki jabatan sebagai panglima komando strategis angkatan darat (Pangkostrad).

Menurut Supardi (2018, p. 14). Ada beberapa gaya kepemimpinan diantaranya;

1. Gaya Kepemimpinan Karismatis

Gaya kepemimpinan kharismatik adalah jenis gaya kepemimpinan yang menonjolkan sisi pembawaan dari pemimpin, pembawaan ini mampu menarik perhatian dan membuat orang lain terpesona. Pesona ini muncul dari gaya bicara, pembawaan, cara berpakaian dll yang membuat orang lain tergugah semangatnya pemimpin yang memiliki gaya ini biasanya adalah orang yang visioner. Yang menyukai tantangan dan perubahan serta bersemangat dalam menghadapinya. Namun, gaya ini memiliki kelemahan, yaitu mereka cenderung banyak berwacana tanpa eksekusi. Orang-orang banyak menunjukkan ketertarikan, namun lama-kelamaan menyadari bahwa itu hanya tong kosong nyaring bunyinya. Orang-orang kemudian kecewa atas keinkonsistenan ini.

2. Gaya Kepemimpinan Diplomatis

Gaya kepemimpinan ini, menekankan untuk melihat sisi positif dan negatif suatu hal. Pemimpin yang menggunakan gaya diplomatis memiliki kelebihan dengan mengutamakan perspektifnya. Ia selalu bisa menilai apa yang dapat dilakukan dari lawannya untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, mereka dianggap sabar, telaten dan bertahan dibawah tekanan. Namun, hal inilah yang dianggap pula sebagai kekurangannya, kesabaran ini memang dimiliki oleh para pemimpinnya namun tidak dengan pengikut pimpinan tersebut, dan kadang kala

mereka meninggalkan pemimpinnya karena tidak sabar mengikuti jejak pemimpinnya.

3. Gaya Kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri khas dimana segala keputusan dan kebijakan yang diambil terpusat dari pemimpinnya secara utuh dan tunggal. Kelebihannya adalah dalam tidak ada satu halangan pun yang akan menjadi penghambat pemimpin ini melangkah dan membuat presentasi. Ketika ia menetapkan suatu hal, maka hal itu adalah absolut tanpa pertentangan yang langkah politiknya itu pasti, kalkulatif dan sistematis. Kejam dan dingin adalah ciri khas pembawaan sifat pemimpin bergaya otoriter ini. Namun, seperti gaya kepemimpinan yang lain, gaya otoriter ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak peduli dengan hal dan orang lain, karena yang terpenting adalah tujuannya.

4. Gaya Kepemimpinan Moral

Gaya kepemimpinan moral adalah gaya kepemimpinan yang memiliki ciri khas pemimpin yang menghargai bawahannya. Biasanya mereka adalah orang yang hangat dan sopan dengan orang lain. Mereka memiliki empati dan simpati tinggi. Pemimpin dengan gaya ini dianggap orang yang jujur, sabar dan penuh pertimbangan dalam membuat kebijakannya. Karena kepribadian yang bersahabat inilah, ia menarik perhatian orang-orang dan dekat secara emosional. Namun, kelemahannya adalah orang ini mudah emosional dan tidak stabil. Mereka cenderung sedih dan terpuruk berlebihan dalam menghadapi sesuatu.

Dengan pemaparan berbagai gaya kepemimpinan di atas, dapat dikategorikan bahwa Soeharto memiliki gaya otoriter. Pemberian label ini adalah

kesimpulan logis dilihat dari pembawaannya selama berkuasa di Indonesia selama 32 tahun di masa orde baru. Ia berhasil menaklukkan Indonesia, memegang kendali atas semua sektor pemerintah baik politik, ekonomi dan militer. Dengan menghalalkan segala cara ia dapat berkuasa atas ABRI, birokrasi dan Golkar. Gaya kepemimpinan ini menjadi pesona Soeharto tersendiri. Juga dengan berbagai kejadian pada masa itu yang sampai hari ini belum tuntas, menjadi hal yang melekat pada masa kepemimpinan Soeharto. Seperti: berbagai kasus pelanggaran HAM.

2.2 Konsep Pemikiran Machiavelli

Pada sub Bab ini penulis bermaksud menguraikan kembali secara singkat konsep pokok dari Machiavelli yang berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan masa Soeharto. Sub bab ini di antaranya akan membahas pemikiran Machiavelli mengenai negara, kekuasaan, hukum, militer, politik tanpa amoralitas dan pragmatisme agama.

a. Biografi

Niccolo Machiavelli adalah seorang filsuf kelahiran tahun 1469 di Florence, Italia. Ayah Niccolo Machiavelli bernama Bernardo Machiavelli, beliau adalah seorang ahli hukum dan seorang bangsawan. Pada saat itu, keluarga Machiavelli adalah keluarga bangsawan kelas menengah ke bawah dari daerah Oltrano. Oltrano sendiri adalah daerah makmur di negara Florence. Niccolo Machiavelli, pada semasa hidupnya, menyaksikan keadaan instabilitas sosial politik di negaranya. Sebagai seorang bangsawan, Machiavelli tergolong bangsawan hidup dalam kekurangan. Karena, tolak ukur kehidupannya berbeda dengan keluarga lainnya (Machiavelli, 1991).

Dalam buku *the prince II*, tokoh Machiavelli menceritakan masa kecilnya dan kelahirannya yang menurutnya mengalami kekurangan (Machiavelli, 2018, p. 3-5). Pada masa kecilnya, ia banyak menghabiskan waktunya dengan belajar, membaca daripada bermain tidak seperti teman-teman sebayanya. Walaupun berada dalam kekurangan, Keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat Machiavelli dalam mengenyam pendidikan. Begitupun dengan ayahnya, ia tetap memberikan yang terbaik dalam pendidikan anaknya. Alih-alih belajar privat dengan orang lain, ayah Machiavelli secara langsung mengajarkan Machiavelli dalam berbagai ilmu pengetahuan. Seperti: matematika, tata bahasa, bahasa asing, retorika. Selain dari ayahnya, Machiavelli kecil juga mendapat pendidikan dari seorang maestro Matteo dan Paolo Da Ronciglione.

Masa remajanya, Machiavelli melanjutkan pendidikannya ke Fiorentino, yaitu sebuah universitas yang dipimpin oleh Cristoforo Landino. Disana, Machiavelli, belajar mengenai pendidikan sejarah dan filosofi moral berdasarkan struktur silabus humaniora. Pada saat inilah, Machiavelli mulai meminati politik, dan mulai terjun ke dunia politik. Pada saat itu Machiavelli bekerja di Palazzo Della Signoria. Ia memiliki jabatan dan peran yang penting dalam dunia politik Florence (Machiavelli, 2018). Sewaktu itu Machiavelli mengemban tugas pada tiga kategori, yaitu, kegiatan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan dan perdagangan luar negeri. Dalam mengemban tugasnya, Machiavelli dibantu oleh bawahannya yang bernama Agustino Vespucci, Andrea de Ramolo dan Biaggio Buonaccorsi yang kemudian menjadi sahabatnya.

Pada usia dewasanya, tepatnya 43 tahun, Machiavelli menyaksikan keruntuhan negaranya. Pemerintahnya, yaitu klan Soderini, mengalami kemunduran pada tahun 1512. Semua hasil kerja kerasnya selama masa hidupnya hancur dan ia diasingkan (Machiavelli, 1991, p. 6). Hal ini karena, klan Soderini yang memiliki kedekatan dengan Machiavelli, runtuh, digantikan oleh klan Medici. Machiavelli dianggap berbahaya, ia dipecat dan dikeluarkan dari dunia politik seutuhnya oleh klan Medici.

Dinamika kehidupan dan nasib yang dialaminya pada saat itu, memunculkan pemikiran bagaimana seharusnya kekuasaan diraih dan dipertahankan (Benedanto, 2015). Keterpurukan tersebut membuat Machiavelli termotivasi dan semangat untuk menyusun cara memaknai penguasa klan Medici yang pada saat itu menjadi penguasa baru Republik Florence. Machiavelli bertekad untuk mengambil hati penguasa dengan pemikiran-pemikiran cemerlangnya. Tekad Machiavelli ini berbuah manis dan pada akhirnya Machiavelli menghembuskan napas terakhirnya di Florence, Italia, 21 juni 1527 pada umur 58 tahun (Machiavelli, 1991).

b. Latar Belakang Pemikiran Machiavelli

Pemikiran-pemikiran Machiavelli yang terkenal sampai hari ini memiliki sejarah yang melatar belakanginya. Yaitu, berdasarkan keadaan negaranya yang pada saat itu mengalami gejolak politik, perebutan kekuasaan dan kekacauan. Machiavelli dengan terobosan pemikirannya memiliki misi untuk membantu Cesare Borgia meraih kekuasaan. Machiavelli membuat surat terbuka dan mempublikasikannya untuk seorang negarawan kepada pemimpin Italia saat itu.

Secara kondisi soal politik, memang keadaan negaranya yang kacau melatar belakangi pemikiran Machiavelli. Namun, secara khusus lagi, ia mempelajari ilmu politik dari filsuf-filsuf pendahulunya. Tokoh-tokoh tersebut mempengaruhi struktur pemikiran Machiavelli sehingga ia menjadi pemikir ulung. Para tokoh tersebut berkontribusi besar terhadap lahirnya pemikiran cemerlang Machiavelli mengenai negara, kekuasaan dan pemerintahan.

Diantara banyaknya filsuf yang menjadi panutan dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap Machiavelli adalah Aristoteles dan Cicero. Pemikiran Machiavelli memiliki corak khas yang bersumber dari Kedua filsuf ini. Machiavelli mengembangkan dasar pemikiran yang berasal dari dua filsuf ini mengenai kekuasaan, negara dan politik. Terlebih lagi, kedua filsuf veteran ini juga menjabarkan tentang bagaimana seharusnya negara menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan masyarakatnya. Penguasaan kehidupan bangsa ini yang pada akhirnya melahirkan pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan tunggal dan absolut. Machiavelli juga berpegang teguh dan berkontribusi terhadap paham realisme yang berhubungan mengenai kekuasaan dan kepemimpinan.

1) Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf yang terkenal berkebangsaan Yunani. Ia hidup pada tahun 384-322 SM. Ketika berada di Athena, ia menjadi murid dari Plato sela 20 tahun. Ia memberikan kontribusi besar terhadap bidang filsafat, biologi, psikologi, fisika, metafisika (Banusu, 2021).

Paham realisme dari Aristoteles, merupakan dasar pemahaman yang dikembangkan oleh Machiavelli dalam konsep kekuasaan (Machiavelli, 2018).

Menurut Aristoteles, negara dianggap sebagai kesatuan yang paling tinggi dan tujuannya mencapai kebaikan tertingginya pula, yakni kesempurnaan sebagai bagian dari negara sebagai manusia (Machiavelli, 2018, p. 10).

Dengan pemikiran demikian, Aristoteles dianggap sebagai seorang yang realistis mengenai sebuah kekuasaan. Ia meneliti tentang bagaimana bentuk politik yang bisa menghantarkan pada kekuasaan dalam pemerintahan, dan bagaimana negara dapat mensejahterakan seluruh warga (Suhelmi, 2001). Bagi Aristoteles, negara merupakan unsur yang harus menguasai segi kehidupan, segala sendi dalam masyarakat harus dipandu oleh negara, dengan begitu, negara memiliki kekuasaan yang absolut. Jika negara memiliki kekuatan tertinggi, rakyat akan mendapatkan kemakmuran, karena ekonomi diatur oleh negara. Konsep ini sesuai dengan pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan. Menurutnya, negara harus memiliki kekuatan yang besar agar penguasa negara nya dapat menerapkan kepentingan, ketertiban, keamanan negara tanpa masalah.

Namun demikian, hal-hal tersebut bukan tujuan akhir dari negara, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni mendapatkan kemakmuran bangsa. Karena manusia adalah *Zoon Politicon*, makhluk yang berpolitik, karena watak manusia inilah negara dibutuhkan sebagai wadah aktualisasi watak manusia (Suhelmi, 2001). Maka, dapat diartikan bahwa pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan dengan pemikiran Aristoteles memiliki persamaan, dengan perbedaannya pemikiran Machiavelli lebih terfokus.

Menurut paham realisme yang dianutnya dari Aristoteles mengenai negara, Machiavelli mengemukakan dan mengembangkan pemikirannya bahwa negara ada

untuk mencapai kepentingan dan sesuai dengan paham realisme yang dianutnya dari realisme Aristoteles terhadap negara, Machiavelli mengembangkan pemikirannya lagi bahwa negara itu ada demi kepentingan negara itu sendiri. Sudah seharusnya negara berambisi untuk meraih tujuan dan kepentingan dengan cara yang paling tepat, sekalipun banyak dianggap licik atau tidak wajar. Maka, kepentingan negara yang menjadi tolak ukur bagaimana pemerintah dijalankan. Pemerintah dianggap boleh melakukan apa saja untuk mencapai tujuan negara. Untuk itu, hal-hal seperti kebaikan, moralitas dan teologi dianggap perlu dipisahkan dalam mencapai tujuan negara. Karena, praktik-praktik moralitas Sifat nya jauh dengan praktik kenegaraan. Hal ini memberi, arti bahwa praktik politik lebih diutamakan dalam pemerintahan dan lebih nyata daripada praktik moralitas yang abstrak.

2) M. Tullius Cicero

Tokoh filsuf selanjutnya yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Machiavelli adalah seorang ahli ilmu berkebangsaan Romawi bernama Cicero yang hidup pada abad 106-43 SM. Machiavelli memang tidak mengatakan bahwa ia mendapat pembelajaran langsung dari Cicero. Namun, pada semasa hidupnya, Machiavelli dituntut untuk mempelajari berbagai pemahaman termasuk bidang kemanusiaan yang merupakan keahlian Yulius Cicero (Machiavelli, 2018).

Cicero adalah seorang ilmuwan yang mendalami bidang humaniora atau bidang kemanusiaan. Ia adalah ilmuwan yang berasal dari Romawi. Ia memegang prinsip pedagogis bahwa disiplin ilmu-ilmu itu ada untuk memelihara nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam menjalankan pemerintahan negara dengan baik.

Artinya, ilmu ada untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Terutama untuk meraih cita-cita negara, yakni meraih kehormatan dan kemuliaan paling tinggi bagi negara.

Pemahaman Cicero yang seperti ini memberikan warna model kekuasaan yang menginspirasi Machiavelli. Ia lebih mengutamakan kepentingan negara dan kelestarian kekuasaan itu sendiri di banding kepentingan pribadi. Pada dasarnya, banyak yang menginterpretasikan pemikiran Machiavelli sebagai hal yang egois, kejam dan licik. Namun, pemikiran otentik Machiavelli ini berakar pada negara politik dan kekuasaan. Dan pada hakikatnya pemikiran Cicero mengenai humaniora ini searah dengan Cesare Borgia.

Cesare Borgia adalah putra dari pasangan suami-istri Rodrigo Borgia (Paus Alexander IV) dan Vannozza Dei Cattane. Ia lahir pada tanggal 13 September 1475 dan meninggal tanggal 12 Maret 1507. Ia merupakan seorang Cardinal Italia, bangsawan dan politikus. Cesare Borgia juga dikenal dengan nama Duke Valentino, Ia dipengaruhi pemikiran ayahnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk berekspansi kekuasaan kedudukan dan karir politik sebagai raja Romagna didukung oleh eksistensi ayahnya yang disegani dalam ruang lingkup gereja.

Dalam melakuakn ekspansi kekuasaan, ia menggunakan empat cara. Pertama, ia memusnahkan keluarga bangsawan yang telah ia kalahkan, agar Paus tidak menggunakan mereka untuk menyerangnya. Kedua, meyakinkan seluruh bangsawan Roma untuk membentuk barisan sekutunya. Ketiga, Memenangkan Kardinal yang menjadi kunci pemilih Paus baru. Keempat, melakukan perluasan

sebanyak-banyaknya sebelum Paus Alexander meniggal. Sehingga ia bisa berhadapan dengan Paus dengan kekuatan sendiri.

Machiavelli merasa terilhami dengan cara dan strategi yang digunakan oleh Cesare Borgia dalam meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Ia bertemu dengan Cesare Borgia ketika ia melaksanakan diplomasi. Ia menjadi subjek pembahasan secara mendalam di buku Machiavelli, *The Prince*.

Bagi Machiavelli, negara mesti independen dan penguasa memiliki otoritas mutlak yang menciptakan kondisi yang kondusif dalam wilayah kekuasaannya. Negara harus berada dalam struktur kekuasaan tertinggi. Segala tindakan dari penguasa dan rakyat bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. .

2.2.1 Gagasan Machiavelli Tentang Negara

Negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang sistematis, tersusun dan terstruktur yang berbeda di suatu daerah, yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas orang-orang di daerah tersebut. Negara memiliki kedaulatan politik atas bangsanya untuk menentukan tujuan kehidupan Negara (Puspitasari, 2001).

Dalam pengertian diatas, dapat diartikan pula bahwa negara adalah tatanan terstruktur yang memiliki kekuasaan dalam setiap bidang di lingkungan daerahnya, seperti bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Juga memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum di daerah kekuasaannya.

Membangun sebuah negara memerlukan masyarakat yang berpolitik dan membuat peraturan bagi masyarakat negaranya. Peraturan ini diperlukan untuk mengakomodir seluruh kegiatan masyarakat agar tidak mengancam

keberlangsungan kehidupan bernegara, juga memberikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat negara. Aktor-aktor yang membuat peraturan tersebut haruslah memiliki kekuasaan terlebih dahulu agar diakui. Maka, tujuan pembentukan negara adalah bagaimana kekuatan, kekuasaan dan kejayaan negara dapat di raih.

Terdapat berbagai macam bentuk negara. Diantaranya: monarki, federasi dan republik. Monarki merupakan bentuk negara yang dipimpin oleh seorang raja atau sebutan lainnya (Machiavelli, 1991). Kekuasaan dalam negara monarki didapat secara turun temurun. Federasi adalah bentuk negara yang didalamnya terdapat juga negara- negara bagian, mereka menyatakan bersatu secara administratif membentuk suatu negara federal. Sedangkan, negara republik adalah negara yang didalamnya untuk memperoleh kekuasaan harus mendapatkan dukungan dari rakyatnya (Aryani, 2018 p.13).

Menurut Machiavelli, negara memiliki peran sebagai kekuatan yang menentukan alur jalannya kekuasaan. Negara adalah realita teoritikal, prinsip abstrak yang realisasi praktisnya direpresentasikan oleh kerajaan atau republik (Machiavelli, 2018). Negara berperan sebagai penyedia aturan serta tingkah laku bagi masyarakatnya. Jika negara dalam bahaya, negara dapat melakukan apapun yang dianggapnya perlu untuk memulihkan stabilitas keamanan.

Niccolo Machiavelli menjelaskan, negara dan pemerintah itu berpusat terhadap birokrasinya. Raja dianggap memiliki lebih banyak kekuasaan, karena raja lah kekuasaan tunggal dan disebarluaskan dengan membentuk aristokrat, juga di dapat karena mewarisi kekuasaan dari pendahulunya. Berbeda dengan bentuk negara seperti republik, kekuasaan itu harus diraih dengan menggunakan sumber

daya yang ada, baik menjadi dukungan publik atau tokoh dalam militer (Mughtar, 2018).

Kekuasaan politik itu ada dengan legitimasi sebuah negara. Eksistensi dari sebuah negara itulah kekuasaan politik. Negara menjadi suatu organisasi yang memiliki kekuatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan kebijakan negara demi tercipta suatu keadaan yang kondusif bagi seluruh rakyatnya. Kehadiran suatu negara merupakan gambaran atas itu kasih dan kondisi manusia yang plural di suatu daerah tertentu (Suhelmi, 2001, p. 133).

Namun bagi Machiavelli negara adalah representasi tujuan seorang pemimpin yang berkuasa (Suhelmi, 2001, p. 133). Kehadiran negara adalah untuk kepentingan negara itu sendiri. Kondisi suatu negara menjadi tanggung jawab penguasa untuk mempertahankan eksistensinya menjaga dan melindungi negara tersebut.

Machiavelli menuturkan dalam memimpin suatu bangsa yang sedang mengalami fragmentasi atau kekacauan seperti di Negara Florence, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan pemimpin yang mampu menggiring perubahan dan membuat hukum yang sesuai untuk menstabilkan keadaan yang walaupun melalui kekerasan. Machiavelli menegaskan, seorang penguasa harus bisa meniru cara-cara hewan (rubah dan singa). Penguasa harus bisa memimpin seperti singa dan lihai juga licik seperti rubah (Machiavelli, 2018).

Karena seorang penguasa harus bisa meniru cara-cara hewan, maka ia seharusnya memilih cara rubah dan cara singa untuk ditakuti. Singa tidak pandai menyelamatkan diri dari perangkap, dan rubah tidak mampu melawan diri dari

serangan serigala. Oleh karena itu, seorang penguasa harus mampu meniru rubah untuk bisa menemukan perangkap dan meniru singa untuk menakuti serigala (Machiavelli, 2018).

Teori realistik yang dikemukakan oleh Machiavelli menganjurkan para penguasa secara mutlak untuk menguasai dan mempertahankan negara dan kepentingan umum, dengan menanamkan rasa nasionalisme sehingga segala stabilitas adalah tanggung jawab bersama.

2.2.2 Gagasan Machiavelli mengenai Hukum & Negara

Sesuatu yang dapat mengatur jalannya suatu negara adalah hukum. Substansi hukum itu untuk mengatur, mengikat, memaksa bahkan menghukum rakyatnya yang melanggar. Hukum di dalam negara digunakan sebagai alat untuk mengatur rakyat yang dipimpinnya.

Penguasa membutuhkan hukum untuk menerapkan kebijakannya terhadap rakyat. Hukum juga membutuhkan kekuasaan sebagai alat legitimasi segala kebijakan penguasa. Tanpa adanya kekuasaan, hukum tidak akan bisa ditegakan. Kaidah hukum hanya sebatas tulisan tanpa kekuatan jika tidak memiliki *power* (Budiardjo, 2008, p. 18). Maka disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat.

Machiavelli mendefinisikan negara sebagai suatu bentuk kekuasaan tertinggi. Demi kepentingan negara, penguasa boleh saja bertindak di luar hukum karena hukum dibuat sebagai pemenuhan kebutuhan. Hukum bersifat tidak terbatas dari rakyat, mereka wajib mentaati dan mematuhi peraturan yang terdapat dalam hukum. Hukum ada sebagai entitas pengatur rakyat demi kepentingan negara.

Machiavelli menganggap, hukum dapat menjadi *track* yang dilalui rakyat agar dapat diatur dan dikendalikan terutama dalam situasi darurat. Sehubungan dengan hal ini, seperti di negara Florence yang membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menggabungkan hukum undang-undang sehingga ditaati oleh rakyat. Machiavelli berpendapat pada dasarnya manusia itu memiliki karakter yang jahat, maka tidak boleh hukum harus ada dalam suatu negara.

Representasi eksistensi hukumnya atur kehidupan dan menciptakan suatu tatanan dari serangan musuh luar maupun dari dalam negara (Machiavelli, 2015). Dengan adanya hukum, Penguasa dapat melindungi negara dari serangan pihak luar, pun menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dari berbagai ancaman kudeta. Hukum memiliki eksistensi sebagai penyangga yang mengikat beraga kehidupan masyarakat dan membangun tatanan kehidupan negara yang kondusif.

2.2.3 Gagasan Machiavelli Mengenai Tentara

Dalam bukunya *Il principel* (Machiavelli, 2018, p. 53) Machiavelli menulis bahwa suatu negara perlu melengkapi dirinya dengan angkatan militer yang baik guna untuk menjaga stabilitas negara baik dari serangan musuh yang berasal dari luar negara maupun kudeta dari dalam negara.

Militer adalah kesatuan perangkat dalam harus dimiliki sebuah negara. Machiavelli berpendapat bahwa negara harus memiliki militer yang sebagai baik dan berani, hal ini berlaku untuk negara-negara yang baru berdiri maupun negara yang sudah lama berdiri bahkan negara campuran pun wajib memiliki militer (Machiavelli, 1991). Paradigma Machiavelli mengenai peran krusial yang dimiliki

angkatan militer ini berasal dari konteks kehidupan dan pengalaman kelim negara Florence.

Mengenai pasukan militer, Machiavelli sangat menentang terkait penggunaan tentara bayaran atau tentara bantuan dari luar negeri (Machiavelli, 1991). Ia bersikap skeptis terhadap kedua pasukan tersebut. Berdasarkan pengalaman yang dialami negara Florence, penggunaan tentara asing maupun tentara bayaran dapat membahayakan stabilitas negara. Penguasa yang menggunakan tentara asing maupun tentara bantuan niscaya tidak akan merasa aman, nyaman dan tenang. Karena, Kedua jenis pasukan tersebut tidak memiliki keterkaitan terhadap negara yang dibelanya. Mereka tidak memiliki loyalitas terhadap pemimpin. Mereka tidak setia, tidak disiplin, pengecut dan tidak setia kawan. Dengan Kata lain tentara asing dan tentara bayaran itu bahaya bagi kelangsungan pemerintahan dan stabilitas negara.

Dengan pemaparan fakta destruktif tersebut Machiavelli berpendapat agar sebuah negara memiliki pasukan mandiri yang loyal dan juga memiliki tanggung jawab tinggi terhadap negaranya. Karena, memiliki pasukan militer sendiri mudah dikendalikan oleh penguasa, dan mereka juga taat, setia dan berjuang untuk mempertahankan Negara (Machiavelli, 1991).

Kekuasaan yang dibangun atas kekuatan sendiri memiliki rentan kestabilan yang tinggi. Maksudnya, kekuatan sendiri yang dimaksud adalah pasukan militer yang dibentuk oleh penguasa sendiri juga orang-orang yang ada berseberangan kekuasaannya (Machiavelli, 2018). Memiliki pasukan militer sendiri jauh lebih baik dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas sebuah negara. Memiliki pasukan militer

yang mandiri bukan hanya hebat dalam seni perang tapi juga mereka memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi bagi negara. Pasukan militer mandiri mampu mendorong kehidupan negara yang kondusif dan aman.

2.2.4 Gagasan Machiavelli Mengenai Politik tanpa Moralitas

Secara singkat politik dapat dimaknai sebagai usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik yang paling fundamental adalah mengaplikasikannya pada seorang pemimpin (Budiardjo, 2008) dan rakyat yang dipimpinnya sebagai wujud dari kehidupan yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan. Politik bertugas untuk berusaha mencapai tujuan yang sama dalam perbedaan yang ada antara pemimpin dan yang dipimpinnya (Sastrapratedja, 2015, p. 147). Sehingga, aktualisasi dan optimalisasi seorang rakyat dapat berlangsung dan mencapai kebahagiaan. Jalinan politik praktis mengharapkan suatu relasi yang baik, harmonis, saling menjaga dan menghargai serta mengakui menerima perbedaan-perbedaan yang ada pada individu suatu negara.

Jalinan relasi yang terjadi dalam ranah politik kerap kali menimbulkan berbagai perbedaan dan permasalahan. Seperti, adanya perbedaan pendapat, perbedaan agama, latar belakang budaya, perbedaan status, dan kedudukan sosial. Faktor-faktor ini dapat menjadi penghubung juga penghancur jalinan relasi yang terbentuk antara individu. Dalam hal ini, politik dipahami sebagai suatu usaha individu untuk mendominasi individu lain dengan menjadi penguasa.

Dalam pandangan banyak orang, buku *The Prince* dan *Il Principe* karya Machiavelli mengutarakan pendapat yang ekstrim. Tetapi, jika diteliti lebih dalam, dan memakai sudut pandang Machiavelli ketika menghadapi hidupnya pada masa

di Firenze, yang terjadi konflik yang berkelanjutan, buku tersebut dapat dikatakan buku yang realistis dan cocok pada masa itu (Machiavelli, 2018). Lebih lagi, buku tersebut dapat digunakan sebagai rekam sejarah yang memiliki keautentikan. Machiavelli fokus menulis bagaimana politik direalisasikan dalam kekuasaan tanpa terlalu mempertimbangkan etika dan moral. Fokus ini ditekankan pada cara meraih dan menstabilkan kekuasaan.

Secara lebih luas lagi, buku *The Prince* dan *Il Principe* dianggap sebagai buku yang memberikan pengaruh yang besar dalam politik terlebih pada cara memperoleh, menjaga, melestarikan dan penggunaan kekuasaan di dunia barat (Machiavelli, 2018).

Perhatian terhadap pemikiran Machiavelli terus bermunculan dari para politikus, mahasiswa dan para sarjana. Pemikirannya pada saat itu disukai pula oleh keluarga Medici yang menjadi penguasa di negaranya. Pemikiran Machiavelli dianggap memberikan kontribusi tentang bagaimana seorang penguasa memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya. Teori yang dikemukakan dalam buku Machiavelli, khususnya *The Prince* dan *Il Principe*, dianggap sebagai metode mutakhir yang cerdas untuk memperoleh tahta dan mengukuhkan pemerintahannya.

Saat pemikiran Machiavelli lahir, negara-negara yang berada di daratan Eropa cenderung menggunakan agama atas legitimasi kekuasaan negara. Petinggi agama dianggap sebagai wakil tuhan yang membawa firman. Keputusan pembuka agama adalah keputusan negara. Pada saat itu orang Italia menginterpretasi tentang semangat dan penghayatan kekristenan secara keliru. Selama itu, agama Kristen

hanya dikenal sebagai agama yang lembut serta cinta terhadap pengorbanan. Namun, bagi Machiavelli, agama harus berkontribusi memberikan kekuatan patriotisme sehingga membangkitkan semangat masyarakat, menyelamatkan mereka dari dekadensi moral.

Oleh karenanya, menurut Machiavelli, agama harus memberikan dimensi pragmatismenya dengan tunduk kepada kepentingan negara. Dalam sejarahnya, agama memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap persatuan suatu negara. yang diutamakan oleh seorang penguasa dalam agama bukan mengenai ajaran cinta kasih atau moral, namun pada gerakan *pasifisme* (Machiavelli, 2018), atau gerakan perdamaian yang berujung pada penaklukan. Agama harus menjadi sarana peningkatan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Negara hanya menjadi alat dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketertiban dan persatuan (Machiavelli, 2018, p. 43).

Dalam bukunya yang sama, Machiavelli berpendapat bahwa kebajikan moral yang paling utama dalam sebuah negara adalah kestabilan (*virtuous*) (Machiavelli, 2018). Untuk merealisasikan negara yang bijak ini, diperlukan tindakan dan keputusan untuk melindungi negara, dengan cara apapun sekalipun dengan kekejaman. Terlebih lagi, Machiavelli memberikan *statement*, apakah sebaiknya seorang penguasa itu ditakuti atau dibenci. Ia mengutarakan bahwa seorang penguasa yang bijak harus membangun kekuasaan berdasarkan apa yang ia kuasai, bukan berdasarkan orang lain (*virtue*), dan mengatakan lebih baik ditakuti daripada dicintai. Ketakutan tidak pernah kalah.

Pada bab-bab awal buku ini, Machiavelli memberikan beberapa pandangan mengenai visi-misi yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan yang efektif dalam beberapa bentuk pemerintahan. Tujuan dibuatnya pemaparan ini adalah sebagai surat kepada penguasa Florence Lorenzo De Medici (Machiavelli, 1991).

Pandangan yang dikemukakan di dalam buku Machiavelli mencakup mengenai negara dan kekuasaan, militer, agama, etika, dan moralitas, serta cara meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Dalam buku sang penguasa, Machiavelli mengutarakan bagaimana awalnya kata "negara" terbentuk. Ia mengungkapkan bahwa negara adalah makna modern terhadap ruang kekuasaan yang ada pada masa Renaisans. Masa ini dikenal sebagai masa kebangkitan Eropa yang mulai lepas dari belenggu gereja. Masa ini turut berkontribusi terhadap Machiavelli dalam membawa wawasan dan pengetahuan baru mengenai agama dan negara (Suhelmi, 2001).

Machiavelli mengatakan kekuasaan adalah *raison d'être*. Negara juga merupakan abolisi kekuasaan tertinggi politik yang sifatnya melingkupi semua hal dan mutlak (Suhelmi, 2001). Kata negara digunakan sebagai alasan atas kekejaman yang dilakukan oleh pengusaha sehingga ia tetap dianggap sebagai seorang patriot, dan dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya ia mengungkapkan, mengenai perbedaan antara terbentuknya negara baru dan negara lama dengan keturunan. Negara yang penguasanya turun temurun, akan lebih mudah untuk mengatur pemerintahannya karena sistem negara ini memiliki homogenitas sehingga dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tidak akan banyak pertentangan atau ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat. Penguasanya pun tidak akan dibenci kecuali

melakukan suatu kejahatan yang amat besar. Penguasa keturunan tidak perlu menurunkan militer dalam mengatur masyarakat.

Berbeda halnya dengan negara yang baru terbentuk. Penguasa perlu mengerahkan sekuat tenaga untuk menghimpun kekuatan pendukung kepemimpinannya, ia memerlukan juga kekuatan militer untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat dan mencegah terjadinya kudeta (Machiavelli, 1991). Waktu yang diperlukan untuk menguasai parlemen dan orang-orang yang berpengaruh pun cukup lama. Tetapi, setelah penguasa duduk diposisi yang stabil dan aman, mereka cenderung dapat mengontrol kekuasaan dalam waktu yang lama. Karena, penguasa tersebut telah mengalahkan lawan-lawannya secara efektif, dan menjadi lebih mandiri.

Lebih jauh lagi, Machiavelli menekankan bahwa realisme lebih penting dari pada idealisme. Ia menggunakan kata-kata seperti kebajikan dan hati-hati dalam merujuk pada hal kemuliaan, semangat dan keunggulan. Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan pemikiran para penganut Kristen yang terlalu sembrono dalam mengambil resiko. Machiavelli lebih menyarankan kestabilan dalam komunikasi politik.

Politik dalam pemikiran Machiavelli selalu dihubungkan pada strategi dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Politik yang dipahami dalam konsep Machiavelli berdasarkan konteks sosial politik yang terjadi di negara Florence. Negara ini merupakan sebuah kerajaan yang berbentuk *polis* di Italia. Pada masa itu, situasi sosial politik di Italia dipenuhi dengan perebutan kekuasaan dan penjajahan yang dilakukan oleh negara besar sekitar Italia seperti Prancis,

Spanyol dan Jerman (Syhelmi, 2008, p. 13). Perebutan kekuasaan yang terjadi di negara Florence pemberian basis pengetahuan dan pemahaman yang begitu kuat terkait usaha seorang penguasa dalam meraih dan mempertahankan negara.

Bagi Machiavelli, politik praktis adalah suatu tindakan nyata dalam meraih kesuksesan kekuasaan. Ia merupakan tokoh perdana yang secara gamblang membuat demokrasi antara praksis politik dan etika. Maka, dalam pemahaman Machiavelli, politik itu tidak boleh disambungkan dengan moral dan etika. Ia selalu mengeluarkan ukuran-ukuran etis dari teorinya untuk menilai norma-norma politik.

Politik yang ideal bagi Machiavelli adalah strategi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan perebutan ini dilepaskan seluruhnya dari aspek etis dan moral (Suhelmi, 2001, p. 125). Maka baginya, seorang pemimpin dalam membuat kebijakan tidak perlu mempertimbangkan etis dan etika. Pemimpin dapat saja menghalalkan segala cara apabila dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan yang membawa kesuksesan politik. Sudah sepantasnya seorang penguasa itu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan strategi yang efektif demi kelangsungan politik praktis. Perkara yang menyangkut moral dan etis perlu dimasukkan dalam ranah politik sejauh memberikan nilai pragmatis pada stabilitas politik dan kekuasaan negara. Penguasa dapat saja bertindak secara etis dan moral misalnya menunjukkan sikap yang baik murah hati manusiawi jujur tetapi semua ini dimaksudkan untuk mempertahankan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan negara dan stabilitas politik menempati posisi primer dalam seluruh tatanan kehidupan suatu negara.

Desain pemikiran Machiavelli yang komprehensif memilih untuk menuturkan realitas politik yang nyata. Ia membicarakan secara transparan apa saja yang secara nyata terjadi dalam realitas politik. Bukan sebaliknya, apa yang mestinya ada dalam realitas politik. Maka pemikiran Machiavelli diidentikkan dengan sesuatu yang konkret di afirmasi dalam aktivitas politik oleh tindakan penguasa bukan hanya bersifat idealisme.

Prinsip dalam menghalalkan segala cara merupakan suatu hal yang mendesak yang perlu diperhatikan oleh seorang penguasa dalam situasi tertentu. Mengenai ini, Leo Strauss mengatakan (Banusu, 2021):

The Liberation of Italy cannot depend on the spontaneous following of all inhabitants of Italy. He has to pursue of a policy of iron, poison, of order and treachery. He must not shrink from the extermination of Italian princely familie sand the destruction of Italian Republican cities whenever action of this kind are conductive to his end

Pembebasan Italia tidak bisa bergantung pada yang spontan mengikuti semua penduduk italia. Dia harus mengejar kebijakan besi dan racun, pembunuhan dan pengkhianatan. Dia tidak boleh segan-segan dari pembunuhan keluarga pangeran Italia dan kehancuran kota-kota republic kapan saja tindakan ada mini kondusif untuk tujuannya.

Selain itu, Machiavelli dalam tulisan-tulisannya mengutarakan bahwa negara (*de'etat*) (Suhelmi, 2001, p. 133) memungkinkan penguasa atas alasan negara melakukan apa saja. Dia mengemukakan perilaku demikian walaupun itu bertentangan dengan moral agama dan hukum. Prinsip seperti ini yang kemudian disebut dengan Machiavellianisme¹. Prinsip-prinsip yang memberikan impresif negatif bagi nama Machiavelli. Kemudian dia dikenal sebagai bukan hanya sebagai

¹ Machiavellianisme adalah mentalitas yang diarahkan kepada perbuatan dan peletarian kekuasaan demi kekuasaan melalui penggunaan sarana apa saja dan melalui kekuasaan yang sewenang wenang atas manusia dan situasi. Mathias Banusu, *Loc, Cit.*,

pengajar kejahatan tapi juga sebagai seseorang yang amoral dalam mengkonsepkan teori politiknya. Pemikirannya memberikan suatu pencerahan dan perkembangan bagi kehidupan politik di abad modern maupun postmodern tapi sayang, sebagian besar orang menolak teorinya karena mereka masih merasa gengsi terhadap hal-hal realitas yang diutarakan oleh mafia Feli dan menerapkannya secara sembunyi-sembunyi.

2.2.5 Gagasan Tentang Kekuasaan

Dari zaman dahulu kala hingga saat ini, banyak orang berpikiran asal sumber kekuasaan itu berasal dari dewa atau tuhan (Machiavelli, 1991). Begitu pula banyak yang berpendapat bahwa pangkat, kedudukan dan jabatan itu adalah manifestasi dari kekuasaan sejati. Seorang filsuf terkenal, Plato, menetapkan ilmu pengetahuan itu kemuliaan, yang pantas mengantarkan seseorang mendapatkan kekuasaan atas pemerintah negara. Menurutnya, hanya seseorang yang memiliki pengetahuan yang layak memegang kekuasaan (Benedanto, 2015).

Walaupun mengetahui semua hal tersebut, Machiavelli enggan memegang pendapat tersebut. Ia menempuh pemikirannya sendiri, menurut Machiavelli, hal yang harus dilakukan untuk duduk dalam tampuk kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri.

Machiavelli, kendatipun mengetahui semua ajaran tersebut, namun enggan menganut pendapat tersebut. Ia menempuh jalan pemikirannya sendiri. Bagi Machiavelli, yang harus didudukkan dalam kedudukan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri. Kepentingan negara menjadi prioritas paling penting yang harus diutamakan. Negara, menurut Machiavelli adalah sumber kekuasaan politik yang

sesungguhnya. Walaupun Machiavelli memiliki pendapat yang sama dengan Aristoteles mengenai hukum yang menjadi dasar negara, namun ia lebih memprioritaskan kekuasaan dibandingkan dengan hukum. Kekuasaan, menurutnya, lebih penting dari hukum

Secara umum, filsuf-filsuf Yunani sering kali menghubungkan kekuasaan dengan kebijakan dan kebaikan serta kebebasan. Tokoh-tokoh pemikir religius itu menghubungkan kekuasaan sebagai wakil dari Tuhan (Machiavelli, 1991). Bagi mereka, kekuasaan politik itu adalah alat untuk mengabadikan diri terhadap tujuan negara yang agung dan mulia. Menurut mereka, kekuasaan tak dapat dipisahkan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan. Artinya, agama tak dapat dipisahkan dengan kekuasaan.

Namun, Machiavelli tak sependapat dengan para para filsuf politik yang mengekang dan membatasi kekuasaan dengan etika, budaya dan religi (Machiavelli, 1991). Menurut Machiavelli, kekuasaan bukan sarana pengabdian kepada kebaikan dan kepada tuhan, melainkan sebagai alat untuk, kekuasaan bukanlah alat yang mengabdikan kepada kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan Tuhan melainkan alat yang mengabdikan kepada kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan negara harus dinomorsatukan. Bagi sang penguasa, ia harus dengan senantiasa mencamkan dengan baik, apa yang perlu dan harus dilakukan demi kepentingan negara. Kekuasaan harus digunakan oleh sang penguasa untuk menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaannya. Dan karena negara hanya mengacu pada dirinya sendiri, maka kekuasaan pun harus mengabaikan etika, budaya dan dalam keadaan tertentu, kekuasaan harus

dibebaskan dan dilepaskan dari kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan dan Tuhan

Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok yang lain sesuai dengan keinginan individu tersebut (Budiardjo, 2008). Machiavelli menuturkan bahwa kekuasaan raja merupakan sumber keabsahan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Tanpa adanya kekuasaan, kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk direalisasikan (Banusu, 2021). Dia menyebutkan dengan realistis bahwa kekuasaan adalah bentuk paling vital dalam kehidupan suatu negara. Pasalnya kekuasaan memiliki eksistensi bagi seorang penguasa untuk melegitimasi tindakan dan kebijakan demi tercapainya kepentingan negara.

Bagi Machiavelli, kepentingan negara ada itu basis penyelenggaraan negara. Secara singkat dikatakan, kekuasaan menempati posisi yang paling utama dalam piramida suatu negara dan kehadiran penguasa adalah sebagai subjek pelaku untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Kekuasaan, pada dasarnya memiliki tujuan untuk dipertahankan meraih dan mempertahankan kekuasaan tersebut Seorang penguasa boleh melakukan apa saja termasuk bertindak secara diktator, koersif dan represif (Banusu, 2021). Dia menganjurkan sebagai penyelenggara negara, penguasa bertindak dengan segala cara untuk meraih kesuksesan. berbagai hal yang menghalalkan segala cara ini dianggap tidak apa-apa karena berorientasi pada kepentingan negara.

Pemikiran-pemikiran ini memberikan stigma dan kesan buruk terhadap machavelli. Tak jarang, dia di cap sebagai seseorang penganjur dan pengajar

kejahatan, licik, amoral, munafik, pembohong, tidak menghormati hak-hak manusia, dan segala sesuatu yang dilakukan berorientasi pada kekuasaan semata. Namun, disisi lain, orang juga menganggap Machiavelli sebagai tokoh yang jujur, realistis dan berani mengungkapkan fakta buruk dari sejarah, membongkar kebobrokan kekuasaan agama dan membuat konsep yang baru (Banusu, 2021).

Baginya, memiliki kekuasaan adalah hubungan yang sangat erat dengan politik. Ketika konsep pemikirannya menyebar ke seluruh Eropa orang-orang dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan merupakan sesuatu yang nyata dan praktis dalam politik. Di mana praksis politik tidak dilihat lagi dari segi Bagaimana seharusnya Tetapi lebih pada menekankan Bagaimana sesungguhnya kekuasaan berperan dalam ranah politik.

Menurut Machiavelli, proses penyelenggaraan kekuasaan harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi dalam sebuah negara seperti di Florence. Dengan situasi politik yang buruk pada negara tersebut, Machiavelli menganjurkan untuk menerapkan kekuasaan despotik. Lebih lanjut, Dia menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan kekuasaan itu didesain dengan kelicikan, kepura-puraan, kemunafikan, kejahatan dan pengkhianatan demi kepentingan negara. Realitas yang terjadi dalam Florence sedemikian nyatanya memberikan implikasi bahwa pemikiran Machiavelli mengenai politik kekerasan perlu dilakukan dalam situasi yang darurat. Ed King (Banusu, 2021).

Secara historis, keterkaitan saya terhadap Machiavelli pada kekerasan politik telah dilihat oleh para pengkritiknya sepanjang waktu yang membentang dari ketertarikan yang tidak dewasa dalam kekerasan untuk kepentingan sendiri sehingga yakin bahwa kekerasan merupakan elemen penting jika brutal dalam setiap pendekatan praktis dalam setiap pendekatan praktis untuk pemeliharaan.

Kekerasan dalam pandangannya adalah sesuatu yang urgen dilakukan ketika negara berada dalam kondisi kritis tindakan Represif atau Kekerasan ini dilakukan demi tercapai kondisi yang kondusif dalam suatu negara.

2.2.6 Gagasan Mengenai Pragmatisme Agama dan Moralitas

Dominasi dan intervensi gereja yang kuat terhadap negara pada abad pertengahan mempengaruhi pemikiran Machiavelli mengenai agama dan moralitas (Suhelmi, 2001). Machiavelli menjelaskan, hal tersebut memberikan efek yang buruk dalam stabilitas negara. Negara menjadi lemah dalam berbagai bidang, bidang politik, pertahanan keamanan dan juga ekonomi karena negara lebih dilihat sebagai bentuk formalitas belaka. Yaitu sebagai media yang melegitimasi segala bentuk kebijakan dan keinginan penguasa religius atau raja yang ditunjuk oleh pejabat gereja tersebut (Machiavelli, 1991). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan dikendalikan oleh otoritas keagamaan sehingga tidak mengherankan jika stabilitas dan keutuhan negara perlahan-lahan ambruk dan sangat sulit untuk dipulihkan.

Otoritas keagamaan yang mendominasi negara memberikan pengaruh terhadap kontra produktif terhadap ekspansi kekuasaan. Seperti prioritas berlaku rendah hati, sopan, penekanan hidup kontemplatif, serta mengutamakan hidup cinta kasih. Satu sisi Machiavelli mengklaim bahwa orientasi hidup yang secara berlebihan pada hal-hal diatas membuat negara menjadi lemah dan mudah dikuasai oleh bangsa penjajah. Di sisi yang lain pula negara dapat tumbuh dan berkembang menjadi eksis ketika diberikan ruang yang bebas dan terbuka untuk mengaktualisasi

visi dan misinya melalui penataran seorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah negara (Banusu, 2021).

Baginya, di dalam agama itu harus terkandung potensi yang baik untuk menghimpun dan mempersatukan seluruh rakyat yang berada dalam suatu komunitas politik agar negara agama memiliki nilai pragmatis. Agama harus berkontribusi untuk memperkuat negara dan menekankan fungsi agama dalam kehidupan politik.

Cara berpikirnya yang dinilai pragmatis cenderung mengarahkan negara untuk mencapai kekuasaan dan keamanan. Karenanya, Machiavelli akan menekankan bahwa pemimpin boleh melakukan apa saja untuk melalui sikap moral etis atau bertujuan untuk mengintegrasikan sebuah negara.

Pada abad pertengahan ketika Machiavelli hidup, manusia selalu dihubungkan dengan persoalan teologis di mana Tuhan selalu menjadi pusat kajian dan pembelajaran bagi manusia. Maka di awal abad modern seluruh kajian teori refleksi lebih difokuskan pada efisiensi manusia (Suhelmi, 2001). Manusia itu menjadi sentral tema utama yang menjadi pembahasan konstruktif maupun destruktif. Machiavelli sangat skeptis terhadap pribadi dan karakter yang dimiliki oleh manusia. Dia memiliki pandangan bahwa manusia itu adalah suatu makhluk yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Baginya, manusia adalah makhluk rasional yang tingkah lakunya diombang-ambing oleh emosinya. Walaupun demikian, Machiavelli mengupayakan suatu prinsip universitas yang masih dipraktikkan oleh seorang pemimpin bagi seluruh rakyat demi menjamin kebaikan wilayah tersebut

Dalam rangka menjalin kesatuan dan persatuan dalam sebuah negara seorang penguasa harus memiliki tindakan-tindakan moral etis terhadap rakyatnya. Dia perlu memiliki kualitas yang dapat mendukung juga menjamin kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Contoh, dia harus menjadi seorang pemaaf, ramah, tulus, beragama dan dapat diterima. Machiavelli menuturkan bahwa seorang penguasa hendaknya mempraktikkan tindakan-tindakan moralitas dengan tujuan untuk menarik minat perhatian dan dukungan rakyat.

Kualitas yang dipraktikkan oleh penguasa itu sesungguhnya menjadi orientasi politik dan pencitraan bagi seorang penguasa. Orientasi politis merujuk pada tujuan politik yang ingin dicapai oleh penguasa tersebut. Sedangkan, pencitraannya adalah trik dan strategi untuk menarik minat dukungan dan rakyat sehingga rencana dan tujuan penguasa dapat terlaksana dengan baik. Secara singkat Machiavelli menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu seorang penguasa harus menjadi seseorang yang bermoral. Namun, dalam situasi Solid, penguasa boleh melakukan apa saja menghalalkan segala cara demi keutuhan negara dan pelanggaran kekuasaan. Moral digunakan dalam kehidupan negara apabila memiliki substansi yang dapat membantu dan mendukung stabilitas negara dan kekuasaan seorang penguasa.

Antara agama dan moralitas itu saling berkorespondensi. Keduanya memiliki nilai politik praktis yaitu untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Penguasa seyogyanya harus tetap mempraktikkan unsur-unsur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam agama dan moralitas asalkan semua itu dilakukan dengan tujuan untuk meraih kekuasaan dan memperkokoh jabatannya.

2.3 Pemerintahan Rezim Soeharto

Indonesia sejak masa kemerdekaan mengalami beberapa kali transisi rezim pemerintahan. Diantaranya masa Orde lama dan Orde baru. Orde lama adalah masa pemerintahan dibawah komando presiden Soekarno. Sedangkan Orde baru adalah masa dimana Presiden Soeharto berkuasa. Periode presiden Soeharto dimulai sejak tahun 1967, ketika Soekarno pada saat itu menjadi presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) (Kasenda, 2013), yang isinya diantaranya menandakan pergantian kepemimpinan negara Indonesia. Tujuannya pada saat itu adalah untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan ekonomi yang carut marut. Tentu, yang paling utama adalah untuk menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Supersemar menjadi *legal standing* bagi Soeharto untuk berkuasa. Dua orang terdekat Soeharto yang membujuk Soekarno untuk menandatangani surat itu ialah Mayor Jenderal Basuki Rahmat dan Mayor Jenderal Amir Machmud, kemudian diberi Jabatan strategis menjadi menteri dalam negeri. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa Soeharto membawa Indonesia pada jalur sentralistik, berpusat pada kekuasaan presiden.

Keberlangsungan rezim ini tidak lepas dari berbagai faktor pendukung langgengnya masa kekuasaan. Hegemoni yang besar dari golongan politik dan partai merupakan sumbangsih terbesar rezim ini dapat berkuasa dengan lama (Kasenda, 2013). Kepemimpinan Soeharto yang dapat menguasai dua kekuatan ini patut diapresiasi. Dengan terkendali nya kekuasaan, Soeharto bisa menstabilkan keadaan Indonesia.

Namun, wacana kesejahteraan tak berlangsung lama, kekuasaan yang besar di pegang oleh kaum-kaum tertentu pada akhirnya menimbulkan keserakahan kekuasaan. Banyak praktik-praktik demokrasi tak berlangsung dengan semestinya, terjadi KKN di lingkungan lembaga negara, tidak adanya rotasi kekuasaan serta pembatasan politik terjadi pada masa setelah puncak Presiden Soeharto berkuasa (Kasenda, 2013). Parlemen pada saat itu hanya sebagai cangkang demokrasi, yang isinya tetap saja kehendak Soeharto yang memiliki kuasa. DPR dan MPR Sebagai wakil rakyat tidak dapat menampung aspirasi, karena pemangku kebijakan tetap ada pada tangan Presiden. Dengan demikian badan legislatif tidak punya peran atas suara rakyat, melainkan hanya menjadi pion-pion presiden dalam menyetujui kebijakan dan aturan. Begitu pula dengan kritik saran yang dilontarkan kepada pemerintah berakhir dengan jeruji besi atau pengucilan. Hal ini membuat banyak pihak bungkam dan memilih tidak bersuara apapun terhadap pemerintah. Puncaknya, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1998 yang dikenal dengan kerusuhan 98. Dengan adanya kejadian ini, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan diteruskan oleh wakilnya pada saat itu adalah B.J Habibie (Anggara, 2013, p.282).

Kendati demikian, pada masa Orde Baru terjadi beberapa kali pemilu, walaupun hanya sebagai pencitraan semata. Pemilu ini berlangsung selama enam kali yakni pada tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari mengapa Soeharto dapat memenangkan pemilu enam kali berturut-turut, walaupun ada yang curiga, langsung di amankan oleh petugas sehingga tidak

berani bersuara. Hal ini membuktikan bahwa Soeharto melakukan segala cara agar mendapatkan kekuasaan dan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. Bahkan pada masa awal pemerintahannya, gebrakan awal yang dibangun oleh Amir Machmud adalah membubarkan semua organisasi pegawai negeri sipil dalam departemen pemerintah, yang notabene adalah organisasi besar yang berafiliasi dengan orde lama, tulis Ben Mboi dalam autobiografinya, Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja (2011: 256).

Bukan hanya itu, Amir Machmud juga menerbitkan peraturan Permendagri nomor 12 tahun 1969 yang isinya melarang PNS terlibat secara langsung dalam partai politik. Kebijakan ini dianggap sebagai buldozer pemerintah untuk menggilas partai politik lainnya selain Golkar (Tandjung, 2007, p.3).

Selama berlangsungnya rezim ini, PNS wajib bergabung dan mendukung partai Golkar sebagai bentuk wadah partisipatif. Walaupun partai ini pada awalnya adalah bentukan TNI, pada masa ini pula lah lahir Korps Pegawai Negara Republik Indonesia yang menjadi wadah tunggal organisasi PNS. Pada masa ini pula angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI) menjadi komponen penting selain Golkar dalam menopang kepemimpinan Soeharto. PNS yang tidak mendukung TNI atau Golkar bisa dipecah atau disingkirkan.

Dalam hal ini, bukan hanya orang PNS nya yang wajib mendukung partai Golkar, namun keluarganya juga. Baik anak maupun anggota keluarga yang lain. Menilik kutipan Tirto dalam Kasenda (2013, p.117) pada tahun 1993 jumlah PNS 3.95 juta. Artinya, sekitar 3.95 juta beserta keluarganya paling sedikitnya menjadi pendukung partai Golkar dalam pemilu. PNS dan keluarganya berbondong-

bondong menjadi penyumbang suara terbesar dalam kemenangan Golkar dan Soeharto. Protes-protes kecil memang bermunculan selama kemenangan Soeharto, namun ialah juga yang mengendalikan militer, setiap intrupsi dan koreksi sekecil apapun yang muncul langsung ditindak dan diberangus. Tak heran, Soeharto bisa mempertahankan kekuasaan politiknya dalam waktu yang lama (Kasenda, 2013).

Selama Soeharto berkuasa, terdapat banyak konflik yang muncul antara pemerintah dan rakyat dinamika demokrasi. Terdapat pula masalah-masalah ekonomi dan HAM. Bahkan banyak yang belum tuntas hingga saat ini. Tiga puluh tahun pemerintah Soeharto dalam di kategorikan dalam beberapa fase, sebagai berikut:

a. Periode Honeymoon (1967-1974)

Periode ini, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan Indonesia masih relatif terbuka. Periode ini adalah masa awal-awal pemerintahan Soeharto dimulai. Militer belum terlalu mendominasi pemerintahan. Masyarakat masih bisa merasakan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Militer berfungsi sebagai keamanan dan kedamaian bangsa dan menjalin hubungan baik dengan berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa dan kelompoknya Islam. Bahkan, presiden Soeharto menjalin hubungan baik dengan para pendukung Soekarno seperti sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik yang di ketahui sebagai tokoh politik paham kiri.

Pada zaman itu, terdapat beberapa kejadian di antaranya kejadian Malari (malapetaka 15 Januari 1974), yaitu demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menuntut pembubaran ASPRI (asisten penasehat presiden) dan perbaikan ekonomi.

Juga, terjadi gejolak arus politik dimana Indonesia melakukan pengintegrasian Timor Timur yang menjadi bagian dari negara Indonesia pada tahun 1976. Kejadian-kejadian ini menandakan berakhirnya periode Honeymoon masa presiden Soeharto (Kasenda, 2013, p. 53).

b. Periode Stalinist (1974-1988/1989)

Fase selanjutnya mulai terjadi otoritarianisme Soeharto dengan ciri mengedepankan dunia politik Indonesia. pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sentralistik diantaranya : kebijakan normalisasi kampus dan pembekuan aktivitas mahasiswa. Adanya kebijakan normalisasi kampus ini, bertujuan agar mahasiswa dapat menjadi agen men of analysis bukan sebagai *man of force* atau bahkan *political force*. Dengan kebijakan ini mahasiswa berhasil didepolitisasi oleh pemerintah. Setelahnya, tidak terjadi lagi gerakan mahasiswa yang menuntut pemerintah.

Pada fase ini pula, kekuasaan militer mulai membesar. Militer mulai menjalin komunikasi birokrasi dan membangun kekuatan dengan menjadi instrumen politik (Kasenda, 2013). Militer menjadi penjaga kekuasaan presiden Soeharto, siapapun oposisi yang berani berseberangan dengan pemerintah maupun menjadi lawan politik Soeharto, maka akan dimarginalisasi. Pemerintah pada masa itu, memberlakukan doktrin keras terhadap masyarakat tentang ideologi Pancasila melalui P4. Juga monitoring terhadap seluruh pergerakan kegiatan dan organisasi masyarakat.

c. Periode Keterbukaan

Periode ini di mulai dengan terbuka nya dunia ekonomi Indonesia terhadap investasi asing. Pemerintah mulai membuka tangan terhadap investor asing yang ingin menanamkan modalnya di bumi Indonesia. Situasi ini terjadi sekitar tahun 1980. Kekuatan ABRI (sekarang TNI dan Polri) mulai tambah berani untuk unjuk gigi di parlemen. Mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan kebijakan dengan perintah presiden.

d. Periode Krisis

Berakhirnya dan keterbukaan periode presiden Soeharto yakni adanya krisis moneter. Dimana kurs rupiah mengalami kemerosotan tajam, nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin melemah. Badai krisis ini sangat sulit diatasi hingga mencapai lebih dari Rp. 10 ribu dollar per AS. Juga terjadi kekacauan sosial politik yang tak terkendali. Pihak-pihak kampus membuat gelombang demonstrasi besar-besaran yang di motori mahasiswa se-Indonesia. Aksi aksi ini terjadi dimana-mana, hingga menimbulkan kematian. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Soeharto. Pada akhirnya, Soeharto mengundurkan diri dari posisi Presiden dan digantikan oleh wakilnya yang pada saat itu adalah B.J. Habibie pada tahun 1998. Berakhirnya era Soeharto menandakan dimulainya era reformasi, dengan harapan lembaran baru ini menjadi harapan akan kehidupan Indonesia yang lebih baik. Sedikit demi sedikit Indonesia merangkak dari keterpurukan demi keadaan sosial ekonomi politik yang lebih baik.

2.3.1 Biografi Soeharto

Soeharto yang kini dikenal sebagai presiden Indonesia ke dua, lahir di kemusuk, Argomulyo, Desa Godean Yogyakarta pada tanggal 8 juli 1921. Ia merupakan anak tunggal dari Kertosudiro yang bekerja sebagai petugas irigasi desa, dan Sukirah (Wibisono, 2020).

Soeharto kecil disekolahkan oleh sang ibu di Desa Puluhan, Godean. Tapi, karena orang tuanya pindah ke daerah Kemusuk Kidul, maka Soeharto yang masih berumur delapan tahun pun ikut pindah ke sekolah yang berada di Pedes. Setelah selesai mengenyam Pendidikan Sekolah dasar, Soeharto melanjutkan jenjang selanjutnya di Schakel Shchol, yang merupakan sekolah Pendidikan menengah pertama yang ada di Wonogiri. Kemudian Soeharto pindah sekolah dari sekolah Schakel School ke SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Ketika bersekolah disinilah, Soeharto mulai menyadari kesusahan dari adanya penjajahan kolonial Belanda (Wibisono, 2020).

Setelah lulus Sekolah, Soeharto memulai karir militernya dengan menjadi anggota KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) dan memulai latihan dasar di Gombong, sebuah Kota kecil yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Setelah lulus dari akademi militer ini. Soeharto kemudian ditempatkan di Batalion XII di Rampai, Malang.

Karir militernya berlanjut dengan menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air), dan mendapat Pendidikan kemiliteran dengan Bahasa Belanda. Ia dapat melalui semua tes dan tahapan dengan baik dan lulus sebagai lulusan terbaik. Tak lama berselang, ia memutuskan untuk menikah tepatnya Pada tanggal 26 Desember

1947, Soeharto menikah dengan putri kedua R. M Tumenggung Soemoharjomo yang berusia 26 tahun, dua tahun lebih muda darinya (Wibisono, 2020).

2.3.2 Transisi Soekarno – Soeharto

Peristiwa yang terjadi tanggal 30 September menjadi penanda transisi pemindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Pada saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat. Tak berselang lama dengan kejadian ini, nama Soeharto melambung tinggi dan pada akhirnya berhasil duduk di kursi nomor satu di Indonesia

2.3.3 Peristiwa G30S

Dini hari tanggal 30 September, sekelompok pasukan bersenjata melancarkan aksinya dengan bergerak menuju kediaman enam perwira militer yang terdiri dari Letjen Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen Mas Tirta Darmo, Mayjen Siswono Parman, Brigjen Donald Izacus Panjaitan, Brigjen Soetojo Siswomiharjo dan Lettu Pierre Andreas Tendean. Para perwira ini dijemput secara paksa dan diberitahu hendak di bawa ke hadapan presiden. Namun, kenyataannya mereka tidak dibawa ke istana tapi ke Lubang Buaya, lokasi yang dekat dengan bandara Halim Perdanakusuma. Ditambah, dengan narasi orkestratif bahwa para perwira ini disuguhi tarian telanjang oleh para perempuan Gerwani sebelum akhirnya disiksa dan dibunuh (Kasenda, 2013).

Pada 1 Oktober kemudian RRI Jakarta mengumumkan bahwa ada tindakan penyerangan kepada para perwira militer dan percobaan kudeta yang dinamai Gerakan 30 September/G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung (Kasenda, 2013). Saat itu juga Soeharto, yang berkedudukan sebagai Panglima

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, mampu bertindak secara efisien dan cepat luar biasa. Soeharto secara inisiatif mengambil alih komando Angkatan Darat yang mengalami kekosongan.

G30S adalah nama bagi gerakan yang dilancarkan oleh PKI dengan menjemput paksa enam jenderal angkatan darat dan membunuhnya dilubang buaya (Kasenda, 2013). Soeharto yang pada saat itu berposisi sebagai pangkostrad, telah mengetahui rencana penculikan ini dari laporan kolonel Abdul Latif. Ia melaporkan bahwa akan ada rencana aksi dewan jenderal hendak melakukan *coupe d'etrat* terhadap Presiden Soekarno. Pada saat itu, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Soeharto telah mempunyai gambaran bahwa aksi ini akan menjadi peristiwa yang dapat menyudutkan pihak PKI dan membuat situasi di Angkatan Darat mengalami kekosongan pemimpin. Ia mempunyai dalih untuk menyalahkan PKI. Ia memperkirakan bagaimanapun, G30S akan terjadi dan Soeharto berada di posisi yang menguntungkan dan tidak akan menjadi sasaran. Dengan rentannya kejadian ini, Soeharto mempersiapkan rencana sematang mungkin untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apabila kekuatan G30S lebih besar dari perkiraannya, maka Soeharto mungkin akan tetap pasif. Apabila G30S dapat dilumpuhkan, ia mempunyai satu batalion dibawah komandonya langsung yang bisa digunakan untuk melancarkan serangan balik seketika.

Ketika para perwira tinggi angkatan darat dibunuh, Soeharto mempunyai alasan untuk membantai PKI dan menyingkirkan kaum soekarno. Dengan tindakan seperti ini, Soeharto secara langsung membangun jaringan golongan anti

komunis dan anti Soekarno sekaligus menghilangkan kompetitor yang menjadi penghalang mendapatkan kekuasaan setelah Soekarno jatuh.

Kekosongan angkatan darat yang terjadi secara mendadak digunakan secara baik oleh Soeharto dengan langsung mengambil inisiatif dan menjadi pimpinan angkatan darat (Kasenda, 2013). Begitu ia merebut kembali RRI, ia langsung mengumumkan bahwa G30S adalah gerakan kontra revolusioner dan melakukan kudeta terhadap negara. Lima pimpinan PKI menyadari mereka telah dikalahkan dalam permainannya sendiri dan tidak dapat mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan keadaan.

Kejadian yang secara cepat berbalik arah ini juga mendapat dukungan dari pihak luar. AS segera membantu Indonesia yang pada saat itu akan menumpas PKI yang merupakan musuh AS. Memo intelejen CIA memastikan bahwa dengan kejadian ini kekuatan Soekarno dan para loyalisnya akan melemah.

Insiden ini terus diberitakan secara besar-besaran oleh media massa. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakatnya (Kasenda, 2013). Rakyat secara psikologis dibuat siap untuk membunuh orang yang berhubungan dengan PKI. Rumah-rumah orang PKI dan simpatisannya dirusak dan dibakar. Organisasi berseberangan naungan PKI pun tak luput dari sasaran. Suasananya ibu kita semakin kacau hingga ke pelosok daerah. Seruang “ganyang PKI” terus bergema di seantero penjuru negeri.

Sebelum peristiwa G30S terjadi. Setidaknya ada tiga kelompok besar di tubuh militer (Kasenda, 2013). Kelompok pertama, kelompok jenderal A.H Nasution yang berada di pihak garis keras ketika berhadapan dengan Soekarno,

kedua kelompok Ahmad Yani yang bergandengan tangan dengan Soekarno, dan Soeharto berada di kubu ketiga yang berada pada posisi yang disudutkan dan diremehkan. Namun, siapa sangka kini ialah pihak yang berhasil menang diatas kelompok lain.

Pada saat G30S berlangsung, Presiden Soekarno sedang bertolak ke luar negeri menjalani kunjungan diplomasi. Segera terdengar kabar bahwa di Jakarta sedang terjadi kekacauan, ia pun langsung berangkat ke tanah air. Ketika presiden Soekarno sampai di tanah air dan memanggil Soeharto untuk meminta kejelasan terkait keadaan yang sedang terjadi, Soeharto malah menghiraukan panggilan tersebut dengan berbagai alasan. Menurut pengamatan militer, Soeharto telah melakukan insubordinasi terhadap pimpinan tertingginya, Soeharto sudah bertekad untuk menghancurkan PKI bersama underbow nya yang notabene adalah para pendukung Soekarno untuk melucuti kekuatan presiden. Soeharto seakan-akan menunggu momen ini, momen yang akan mengantarkan angkatan darat ke Piramida kekuasaan tertinggi.

Kecepatan AD dalam menyalahkan PKI, melakukan propaganda dan Dengan mengorganisir kelompok sipil anti komunis Dengan kepiawaian memancing dan mematik opini publik untuk menjustifikasi aksinya, Soeharto berhasil mendapatkan dukungan masyarakat yang marah akan terjadinya G30S, sehingga muncul tuntutan untuk segera membubarkan PKI. Tuntutan ini dinamakan Tritura (tiga tuntutan rakyat) yang isinya di antaranya: bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan perbaiki harga (Kasenda, 2013).

Dengan adanya kejadian ini, Soeharto bisa dipandang sebagai seseorang yang pandai dan dapat memanfaatkan situasi yang datang padanya. Tidak ada sumber yang valid mengatakan bahwa ia adalah dalang terjadinya pemberontakan yang dilakukan PKI. Ia semata-mata berada di posisi yang menguntungkan apabila terjadi pemberontakan PKI (Fortune), kesempatan emas ini langsung gunakan dan dipersiapkan dengan sangat baik melalui berbagai rencana sistematis dan strategi menggunakan potensi yang dimilikinya (virtue).

Propaganda terus menerus dilakukan oleh media massa yang diorganisir pihak AD dibawah komando Soeharto (Kasenda, 2013). Masyarakat pada akhirnya dibuat defensif terhadap orang-orang yang tergolong PKI dan menanamkan ilusi balas dendam atas apa yang terjadi pada enam perwira yang dibunuh. Suasana ibu kota semakin memanas, banyak rumah orang PKI dan simpatisannya yang dirusak, di bakar, orang-orangnya di bunuh. Sentimen terhadap anti komunisme semakin meningkat, rakyat didorong untuk tidak memberikan ampun terhadap orang-orang PKI. Terjadi pembunuhan massal selama Oktober-Desember 1965. Berjuta orang yang dianggap PKI dan simpatisannya di bunuh dan dipersalahkan. PKI diidentifikasi sebagai partai yang bersalah. Tidak ada manuver yang bisa menyelamatkannya (Robert dalam Kasenda, 2013).

Pecahnya kejadian G30S membuat kesatuan aksi yang bertujuan membersihkan PKI dan segenap unsurnya dari bumi Pertiwi. Ketika terbukti sejumlah perwira angkatan darat dibunuh, ia mempunyai alasan untuk naik ke kekuasaan tertinggi AD, menyingkirkan PKI, dan kaum soekarno. Sesuai berbahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Adanya pemberontak G30S

membuka gerbang Soeharto untuk menghimpun kelompok anti komunis, dan memukul mundur kompetitornya di angkatan darat.

2.3.4 SUPERSEMAR

Soeharto tidak membuang-buang waktu dan langsung menggunakan kekuasaan yang baru didapatkannya (Kasenda, 2013). Tepat sehari setelah SUPERSEMAR resmi dikeluarkan, Soeharto mengerahkan seluruh kekuatan Angkatan Darat untuk menahan, melakukan pembunuhan massal dan menyingkirkan PKI, yang notabene adalah pendukung Soekarno. Soekarno mendapat pukulan yang besar dengan adanya insiden ini, kewibawaannya tercoreng, karena ketidakmampuan mengatasi hal ini dan tak mampu mencabut mandat yang telah ia berikan kepada Soeharto.

Dengan mandataris Supersemar, Soeharto membuat Soekarno dan para pengikutnya tak berdaya. Surat ini dibuat tanpa persetujuan para panglima Angkatan Laut, Udara dan Kepolisian. Tetapi, Ketika Soekarno telah membubuhkan tanda tangannya, mereka tak bisa menolak perintah Soeharto untuk membubarkan PKI dan menempatkan para pendukung Presiden Soekarno dalam keadaan serba salah. Perintah ini mengikis simpati kepada PKI dan tak ingin dianggap membela partai tersebut.

Soeharto kemudian melampaui kewenangan yang diberikannya. Selama ia bertugas dalam rangka memulihkan keamanan (Kasenda, 2013). Tak satu kalipun ia pernah melapor kepada Soekarno. Bahkan dengan berbagai cara, ia melakukan propaganda dan mendorong mahasiswa serta partai politik untuk mencongkel

Soekarno dari kekuasaannya. Soekarno memang masih berstatus presiden, tetapi dengan adanya supersemar, kekuasaan eksekutif telah beralih ke tangan Soeharto.

Situasi ekonomi yang carut marut dan aksi mahasiswa turun kejalan menuntun isu isu yang hangat terjadi menjadi penghias hari 11 Maret 1966 ketika Soekarno melangsungkan sidang kabinet (Kasenda, 2013). Ditengah tengah pidatonya, secara tiba-tiba Soekarno diberi nota dan langsung menyadari bahwa ketidakhadiran Soeharto dalam rapat kabinet adalah suatu pertanda buruk.

Pada hari itu, dengan pertemuan tertutup dan dihadiri oleh beberapa orang dari pihak Soekarno dan Soeharto, lahirlah surat perintah 11 Maret yang isinya presiden memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan dan revolusi.

Pada saat Supersemar berlaku. Soeharto langsung membentuk Kopkamtib (komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban). Lembaga ini mengendalikan intelijen keamanan sampai ke seluruh desa di Indonesia. Para komandan militer provinsi, kabupaten ,kecamatan dan desa sebagai petugas eksekutif yang diberikan wewenang untuk menangkap dan menahan siapa saja tanpa persidangan untuk mengikis basis komunis.

2.3.5 Kekuatan Soeharto

Soeharto mampu mengendalikan militer dengan kepiawaiannya memainkan politik mutase rotasi di tubuh Angkatan Darat khususnya. Mutasi rotasi ini didasarkan loyalitas-imbalan secara personal kepada rekan perwira nya. Soeharto berhasil membuat format melembagakan peran formal militer dan memberi mereka

hak-hak istimewa mereka dalam keikutsertaan di bidang politik sipil, sosial dan ekonomi.

1. Kekuatan Awal Soeharto dalam Bidang Militer

Angkatan Darat yang kehilangan pemimpinnya merupakan kesempatan emas bagi Soeharto untuk membentuk kekuatan awalnya. Adanya supersemar, memberikan Soeharto legitimasi untuk mengerahkan tentara menumpas golongan komunis. Setelah kurang lebih enam bulan selama periode Oktober-Maret dalam penumpasan PKI. Ia mulai membenahi dan memonopoli kekuatan Angkatan Darat

Supersemar yang awalnya sebagai mandataris eksekutif dari Soekarno Kepada Soeharto untuk mengamankan situasi, menjadi alat monopoli politik untuk terus merongrong kekuatan Soekarno di dalam pemerintahan. Kepemimpinan Angkatan Darat berseberangan Soeharto segera mengkonsolidasikan kekuatannya dengan menempatkan orang-orang yang sudah diketahui loyal kepada nya di pos-pos penting dan secara efektif menghambat jenderal A.H. Nasution yang pro Soekarno.

Kemudian politik ABRI di legitimasi dengan ideologinya yaitu dwifungsi ABRI sejak masa kemerdekaan. ABRI mendominasi perpolitikan diberbagai sektor sosial politik. Sesudah Soeharto memegang kendali ABRI, semua kekuatan politik lain ditempatkan dibawah peran militer.

Soeharto tidak memiliki saingan lagi di dalam tubuh Angkatan Darat pada tahun 1969. Ia berhasil berkat kinerja politik ABRI, langkah taktis dan strategis dalam mengangkat panglima dan memposisikan perwira-perwira nya dalam jabatan non-militer.

Target selanjutnya adalah angkatan udara, laut dan kepolisian. Soeharto melakukan pembersihan dengan cermat dalam tubuh Angkatan udara sesuai terjadi peristiwa G30S. Soeharto melakukan penataan ulang lembaga mengenai kewenangan, struktur dan fungsi baik pada Angkatan laut, angkatan udara dan polisi. Ia menawarkan posisi duta besar dan memberlakukan tahan rumah bagi para perwira yang bersikukuh terhadapnya.

Setelah beberapa tahun, ia mengatur ulang komposisi kekuatan militer dan menimbang-nimbang rencananya. Soeharto kemudian menyatukan komando-komando kekuatan militer yang awalnya berjalan sendiri-sendiri kini dibawah komandonya langsung. Ia membuat sistem terintegrasi dan pemindahan kewenangan sehingga seluruh komando terpusat kepada Soeharto sendiri. Bukan ditangan panglima angkatan atau panglima teritorial. Soeharto menimbang, bahwa kekuatan besar yang di miliki oleh militer tidak boleh jatuh ketangan orang lain.

2. Kekuatan Awal Soeharto dalam Bidang Politik

Bilveer Singh (dalam Peter Kasenda, 2013) mengatakan, bahwa peran militer dibawah kepemimpinan Soeharto naik tingkat menjadi kekuatan sosial politik. Setidaknya, ada empat bidang utama yang di isi posisi nya oleh militer; 1). Militer berperan sebagai stabilisator. Ia berfungsi untuk menciptakan keamanan dan keselamatan fisik terutama setelah terjadinya kudeta; 2). Militer berfungsi sebagai dinamisator untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pertumbuhan ekonomi. Militer menjadi rekan dalam menciptakan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Karena pada pemimpinnya sipil sebelumnya, dianggap gagal dalam upaya besar ini; 3). Militer

menjadi garda terdepan memimpin dan menjadi pelopor bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Karena, kekuatan-kekuatan lain pada saat itu, seperti politik sipil dianggap lemah karena adanya keadilan G30S; 4). Militer mengambil alih posisi dalam melaksanakan sistem demokrasi dan pesta demokrasi seperti pemilu tahun 1957.

Beberapa faktor yang melatar belakangi militer masuk ke dalam dunia sosial politik. Diantaranya, sebagai garda terdepan ketika terjadi kerusuhan. Militer menjadi alat pertahanan negara, yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Militer mengidentifikasi dirinya sebagai stabilisator negara dan pelindung kebebasan umum.

Setelah kudeta tersebut, Soeharto mulai menerapkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia (Kasenda, 2013). Ia mau mengintervensi Soekarno dalam pembentukan kabinet baru pada maret 1969. Soeharto menjadi salah satu dari enam deputi utama kabinet dwikora yang disempurnakan. Ia menjadi menhan/panglima ABRI /kepala staf KOTI. Komposisi keanggotaan kabinet ini sebagai tahap awal yang mencerminkan kemajuan.

Pergantian kabinet menunjukkan kekuasaan telah berangsur beralih kepada Soeharto dan sekutunya (Kasenda, 2013). Meski kekuasaan terus meningkat, namun Soeharto masih merasa terancam terhadap kedudukannya secara konstitusi dan dengan wibawa politik Soekarno. Kemudian Soeharto melengkapi dirinya dengan penyeimbang institusional. Pada 21 Juli 1969, MPRS meninggikan status Supersemar yang status awalnya sebagai pelimpahan wewenang presiden yang bisa

dicabutkan saja menjadi keputusan badan tertinggi negara yang tidak bisa dibatalkan oleh Presiden.

Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1966, MPRS mencapai kesimpulan bahwa Presiden Soekarno tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagai presiden berdasarkan UUD maupun instruksi dan ketetapan MPRS (Kasenda, 2013). MPRS mencabut mandatnya sebagai presiden dan melarangnya melakukan kegiatan politik sampai diberlakukannya pemilu. MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dengan masa jabatan sampai MPRS mampu melakukan pemilihan umum.

Peralihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan berbagai reaksi dari pihak luar. Pemerintah AS tidak menyembunyikan kegembiraannya atas lengsernya pemerintahan Soekarno. Seperti yang diketahui Soekarno adalah presiden yang lebih suka berdiplomasi dengan negara China pada masa pemerintahannya yang merupakan musuh AS. AS dan Inggris melihat peluang baru ketika Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Penumpasan PKI dan pengkerdilan kekuasaan Soeharto memberi dampak terhadap hubungan AS-Indonesia. Tugas Soeharto selanjutnya setelah menstabilkan keadaan negara adalah memperbaiki ekonomi bangsa (Kasenda, 2013).

Para pejabat as berpendapat, bahwa kewajiban utama pemerintah Indonesia setelah penumpasan para pelaku kudeta adalah menstabilkan dan merehabilitasi ekonomi dengan merengkuh para kreditor dan investor (Kasenda, 2013). AS merasa dirinya yang paling dibutuhkan oleh Indonesia, karena as memiliki kekuasaan dan kekuatan juga kredibilitas internasional untuk menjawab program penyelamatan ekonomi Indonesia.

AS kemudian menjadi pembuka jalan bagi Indonesia kepada lembaga keuangan dunia, IMF, Bank internasional yang mereformulasi program bantuan terhadap penyelamatan ekonomi Indonesia yang terpuruk dan membutuhkan dorongan besar (Kasenda, 2013).

Harlod Crouch (dalam Kasenda, 2013) mengatakan, tindakan Soeharto dengan Surat kuasa Supersemar telah menjebak para pendukung presiden dalam keadaan tak berdaya. Surat ini dibuat tanpa persetujuan panglima AU AL dan kepolisian. Soeharto telah melampaui wewenang yang diberikan yang hanya sebatas memulihkan keamanan sebagai tugas keseharian sebagai pangkostrad. Ia bahkan tidak pernah melaporkan tugasnya tersebut terhadap presiden.

Re Elson mengatakan bahwa kegigihan Soeharto untuk menerima posisi sebagai pejabat presiden selama 1 periode tertentu memperlihatkan tingkat kesabarannya (Kasenda, 2013). Dia pada awalnya merasa puas dengan meniti karir militernya sebagai seorang perwira senior yang baik dan bertanggung jawab. Namun gejolak yang terjadi 30 September membuat keadaan berubah drastis, ia mendapati dirinya berada di pusat kekuasaan dan masuk ke dalam posisi sentral dan menikmatinya. Ia bahkan menerima tangan dan kehormatan dengan berusaha menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Ia merasa senang memegang kendali.

3. Kekuatan Awal Soeharto dalam Bidang Ekonomi

Setelah kekuatan kudeta yang dilakukan oleh PKI dapat diatasi. Soeharto muncul sebagai pahlawan negara yang mencegah terjadinya makar. Ia pun mulai mengambil langkah selanjutnya dengan mengintervensi reshuffle kabinet dwikora

yang disempurnakan. Soeharto kemudian menjadi salah satu dari enam deputi utama.

Pihak luar negeri menyambut dengan gembira kemenangan yang diraih oleh Soeharto dalam penumpasan PKI. Terutama AS. Hubungan Indonesia-AS yang sempat merenggang karena Soekarno, kini terjalin lebih baik berkat Soeharto yang terbuka. AS mengimbau, Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan perbaikan, rehabilitasi, dan menstabilkan ekonomi. Cara yang dilakukan ialah dengan menggaet investor asing. AS menganggap dirinya adalah pihak yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam menjalin hubungan dengan para kreditur dan merasa memiliki tanggung jawab dalam menjawab kebutuhan rehabilitasi ekonomi Indonesia yang sangat besar.

Penyelamatan ekonomi kemudian akan menjadi prioritas internasional karena cakupan yang besar dan keterlibatan utang nya luas. Karena kemampuan Washington terbatas, maka bantuan jangka Panjang harus dikelola oleh badan keuangan internasional, IMF.

Beberapa selang waktu setelah menerima bantuan dari AS, ekonomi Indonesia melalui triumvirat Soeharto seperti Adam Malik dan Hamengku Buwono IX menunjukkan kemajuan yang stabil dan pulih. Indonesia kemudian selanjutnya berupaya mendapat bantuan dari Jepang dan Jerman, mengendalikan Kembali valuta asing dan menahan laju inflasi harga bahan pokok. Negara-negara lain seperti Inggris, Jepang dan Australia juga kemudian mencari peluang bantuan ekonomi dengan harapan adanya transformasi ekonomi dan kebijakan luar negerinya yang pro terhadap mereka.

Para penasihat ekonomi Soeharto menyadari dengan betul adanya bantuan luar negeri dan utang harus disertai dengan investasi swasta yang substansial jika Indonesia ingin menciptakan kesempatan untuk melakukan pembangunan (Kasenda, 2013). Mengingat situasi kondisi ekonomi Indonesia yang sangat menyedihkan saat itu. Para teknokrat percaya bahwa Indonesia hanya punya sedikit harapan untuk menarik kembali modal asing khususnya di tingkat multinasional.

Pada pertengahan Juni 1967, pertemuan kedua IGGI (Intergovernmental Group on Indonesia) di Swedia, Indonesia kembali mendapat kepercayaan dari para kreditur dan organisasi internasional (Kasenda, 2013). Pemerintah Indonesia mencapai tiga tujuan utama penyelamatan perekonomian negara. Yaitu; pemberian bantuan darurat yang signifikan, penjadwalan ulang utang dan pemberian kredit internasional.

Berbeda dengan usahanya yang menjalin kerjasama finansial dengan pihak luar, di dalam negeri Soeharto dan para sekutunya secara aktual melakukan kegiatan yang menurunkan ekonomi Indonesia dengan membelokkan dana dari Jakarta dan bank Indonesia untuk menghimpun dana secara terpisah demi kepentingan militer dan menciptakan pemerintahan paralel. Soeharto dan para loyalis nya menghimpun dana dari impor minyak dan berbagai sumber dari pedagang yang menjadi pendapatan devisa negara.

Pengalihan pendapatan negara ini memberikan pukulan telak kepada pemerintah Soekarno, namun ia tak dapat melaksanakan apa-apa, karena dana ini diperlukan oleh pihak militer untuk terus melakukan tekanan kepada PKI.

Keruntuhan ekonomi menjadi satu dari sekian banyak penyanggah pada akhirnya membuat MPR menyatakan bahwa Soekarno tidak mampu lagi menjabat sebagai Presiden secara konstitusi.

Maka dapat disimpulkan selain dibagi dalam 3 sektor utama militer, politik dan ekonomi. Menurut William Liddle, terdapat 3 pilar utama keabsahan pemerintah rezim Soeharto (Kasenda, 2013, p. 44). Pertama, adalah dengan dwifungsi ABRI, ABRI mengklaim dirinya sebagai pembela nasionalisme dari masa perang dan pasca kemerdekaan dalam membela ideologi negara Pancasila. Pancasila ditafsirkan sebagai ideologi yang berada ditengah-tengah yang mengandung kekuatan tanpa melemahkan kaum kiri (komunis) maupun kanan (Islam). Dwifungsi ABRI menjadi jaminan Indonesia akan tetap berideologi Pancasila.

Pilar kedua adalah Supersemar. Surat keputusan ini memberi wewenang kepada jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan dalam menjaga ketertiban dan mengamankan negara dari ancaman kudeta. Dokumen ini menjadi keabsahan dirinya lebih jadi seorang jenderal.

Pilar ketiga adalah konstitusional MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dengan kekuatan MPRS yang dipegang oleh Soeharto, ia dapat membersihkan unsur-unsur PKI di dalam kabinet. Dengan dokumen Supersemar, ia mengangkat dirinya sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, dan mengasingkan Soekarno ke dalam pengasingan konstitusional, juga ia menciptakan landasan konstitusional untuk membuat format politik dimana ia bertanggung jawab kepada MPR dan

setiap lima tahun sekali dipilih kembali oleh mayoritas anggota MPR (Liddle dalam Kasenda, 2013, p. 35).

2.3.6 Kondisi Pemerintahan Masa Soeharto

John Rosa dalam Kasenda (2013, p. 2) mengatakan, Soeharto menggunakan kejadian G30S untuk merongrong kekuatan Soekarno dan menaikan dirinya sampai ke kursi presiden. Soeharto menganggap adanya peristiwa itu adalah pengkhianatan dan kejahatan besar yang menyikapi ada masalah mendasar pada kepemimpinan Soekarno. Soeharto menuduh PKI yang mendalangi G30S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI. Tentara Soeharto menangkap 1.5 juta orang yang terlibat dengan PKI. 500.000 orang tewas tertuduh sebagai komplotan PKI.

Inti kekuatan dari rezim Soeharto adalah pada militer yang didukung oleh kelompok Muslim yang berseberangan dengan PKI (Kasenda, 2013). Apabila Soekarno mendasarkan otoritasnya pada karisma pribadi dan kemampuan membakar semangat nasionalisme para pengikutnya. Sedangkan Soeharto mencari legitimasi dengan membangun ekonomi berbasis ABRI yang menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang makmur.

Pemerintah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto adalah rezim otoriter modern yang kekuasaannya berlangsung paling lama sepanjang sejarah dibanding negara berkembang lainnya. Alasan utama terbentuknya pemerintah otoriter baik dengan dominasi militer maupun partai tunggal adalah demi mengatasi situasi darurat kekacauan politik, turunnya stabilitas dan keamanan negara membutuhkan sistem yang terpusat dan terkendali.

1. Militer Masa Soeharto

Seperti yang telah dijelaskan, kekuatan dominan Soeharto terhadap Angkatan darat sudah tak tersaingi lagi. Ketika ia duduk di kursi presiden, kekuasaan angkatan laut dan angkatan udara pun berangsur-angsur menjadi loyalisnya. Setelah mengamankan unsur ABRI berada dalam kendali sepenuhnya, Soeharto kemudian menyatukan komando-komando dan mengubah status panglima menjadi kepala staf yang ada berseberangan pengawasannya. Pada Oktober dan November 1969, enam komando wilayah pertahanan (kowirham) diciptakan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas angkatan bersenjata dari tingkat staf komando ke bawah. Sementara kekuasaan nonmiliter yang asalnya dipegang oleh panglima dan Kodam dihapus dan dialihkan ke kementerian pertahanan (menhan) berseberangan Soeharto. Struktur komando pusat dan terintegrasi ini membuat kekuasaan berada ditangan presiden bukan di tangan panglima (Haryanto dalam Kasenda, 2013, p. 117).

Masa-masa awal Soeharto berkuasa, lembaga kemiliteran di Indonesia disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Lembaga ini terdiri dari unsur Angkatan perang dan kepolisian. Angkatan perang sendiri terdiri dari ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia).

Selain bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, ABRI memiliki fungsi lain dalam bidang sosial politik yang disebut dengan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI ini dikemukakan oleh Abdul Haris Nasution pada

12 November 1958. ABRI berfungsi sebagai lembaga ketahanan tempur negara juga berfungsi sebagai pembina wilayah.

Pada masa presiden Soeharto, militer bukan hanya menjadi rezim militer yang memegang kekuasaan negara namun pula menjadi kekuatan sosial. Soeharto juga melakukan invasi militer ke berbagai kepentingan domestik kaum sipil. Berbagai posisi pemerintahan semakin banyak di pegang oleh kelompok militer. Pada tahun 1977, 53% jabatan tinggi negara dipegang oleh kaum militer. Kepala staf kekaryaan Hankam Letjen ABRI Muhammad Kharis menyebutkan bahwa pada 1982 8.035 petugas ABRI ditugaskan di berbagai posisi strategis. 63 posisi duta besar di isi 39. 4 dari 16 jabatan Konsul jenderal. 18 dari 27 jabatan gubernur. 130 dari 241 Jabatan Bupati, 14 dari 19 sekretaris jenderal departemen, 15 dari 18 jabatan inspektur jenderal, 8 dari 18 jabatan kepala lembaga, 21 dari 25 sekretaris dan asisten menteri (Salid dalam Kasenda, 2013, pp. 118–119).

Periode awal Soeharto melenggang di Kursi presiden, Soeharto belum bisa menemukan orang-orang yang kompeten untuk mengisi berbagai posisi strategis. Sedangkan posisi-posisi ini harus segera diisi demi kelancaran administrasi dan kondusifitas sosial. Walaupun banyak warga sipil yang merasa mampu, rezim Soeharto belum dapat mempercayai sipil sepenuhnya. Berkaca pada kejadian yang belum lama terjadi (G30S), warga sipil adalah kaum yang tak terintegrasi dan rawan melakukan kekacauan, mereka bertindak sendiri-sendiri dan kurang loyal terhadap pimpinan. Sedangkan, demi kelancaran pembangunan dan pemulihan ekonomi, Indonesia membutuhkan sistem dan pemerintahan yang bahu membahu dari bawah sampai pusat, pemerintah yang satu suara bulat, yang terintegrasi dengan cepat

melakukan instruksi dari atasan. Maka, pengisian jabatan oleh perwira tentara memang pada saat itu diperlukan dan merupakan pilihan yang baik.

Penempatan personil ABRI ini bukan hanya pada daerah atau Jawa dan yang rawan saja, melainkan juga di daerah yang relatif stabil (Kasenda, 2013). Hal ini berkaitan dengan konstelasi politik nasional. Pemerintah waspada terhadap kemunculan atau adanya gembong PKI yang masih tersisa di daerah yang dianggap sudah stabil. Begitu pula dengan daerah yang rawan seperti di daerah Aceh, Timor dll, di daerah ini umumnya masih langka tenaga sipil. Yang memenuhi kualifikasi pejabat pemerintah sehingga diisi oleh para personel ABRI.

ABRI mendominasi bukan hanya di daerah pusat namun juga di daerah pelosok. Mereka mendominasi pemerintahan penentu kebijakan. Akibatnya, persetujuan kepala ABRI menjadi hal mutlak ketika ada pengangkatan jabatan. Bukan hanya itu, tapi juga masalah-masalah yang lain seperti perizinan, pemberian kontrak, dan keputusan atas proyek-proyek yang ada di daerah harus selalu di koordinasikan terlebih dahulu kepada ABRI. Sehingga, personel yang mengisi jabatan akan terlebih dahulu mengutamakan kepentingan ABRI dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Aspirasi dari masyarakat banyak yang kalah oleh kepentingan kelompok ABRI. Bukan hanya itu penempatan para pengisi jabatan dari ABRI ini umumnya dipilih secara spontan dan ditunjuk langsung oleh atasan, bukan dengan melalui mekanisme seleksi yang komprehensif dan kompetitif.

Penempatan personil ABRI dalam lembaga legislatif juga menuai masalah lain. Tak hanya banyak sekali para perwira ini yang menjadi anggota tapi juga menjadi ketua DPRD daerah yang menghalangi tersalurkannya aspirasi masyarakat

dengan dalih stabilitas dan mekanisme kerja ABRI (Kasenda, 2013). ABRI, yang memiliki sistem komando dan hierarki sering kali mendahulukan kepentingan korpsnya dibanding kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Contohnya saja; pemberian jatah 75 kursi oleh ABRI untuk DPR pusat dan 20% untuk F-ABRI di DPR I dan DPR II kurang adil jika dikaitkan dengan sistem proporsional yang dipakai dalam pemilihan umum. Dalam pemilu, 1 anggota DPRD mewakili 10.000 penduduk. Jika dilihat dari perhitungan tersebut, sangat jelas bahwa representasi ABRI dilembaga legislatif terlalu berlebih-lebihan. Persoalan lainnya adalah dasar hukum keterwakilan ABRI di DPR, DPRD, MPR pada keputusan MPR yang dimaksud dengan keterwakilan ABRI adalah serikat pekerja, koperasi dan badan kolektif lainnya. Dan rujukan ini dibuat pada tahun 1969 jauh sebelumnya ABRI sudah berkuasa di parlemen.

2. Sosial Politik Pemerintahan Soeharto

Landasan politik militer ABRI khususnya Angkatan Darat mendapat legitimasinya setelah lahirnya konsep “Dwifungsi ABRI” pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Lama dikenal dengan “konsep jalan tengah” ABRI yang diperkenalkan oleh Nasution pada 1958, yang intinya pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bangsa, untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”. Berikutnya secara simultan akan datang silih berganti. Masa Orde Baru terus berusaha memantapkan dan mengokohkan posisi dan peran politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer Pada masa Orde Baru menghendaki adanya ketertiban dan kondisi yang stabil dan baik dari segi politik, ideologi maupun masyarakat. Militer

pada masa ini memposisikan dirinya sebagai penjaga integritas bangsa dan negara, pengaman jalannya pembangunan, melindungi keamanan dan ketertiban negara, penjaga ideologi tunggal Pancasila, dan sebagai dinamisator dari pada pembangunan.

Pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI terhadap peran-peran militer pada masa pemerintahan Soeharto, khususnya dalam bidang sosial politik memang mengerucut kepada hasil yang telah dilakukan oleh militer itu sendiri. Setelah Dwifungsi ABRI ini mendapatkan legitimasi dari pemerintah lewat konstitusi, maka semakin lebarlah jalan militer untuk menjalankan fungsi keduanya. Pengaruh dan peran ABRI di bidang non-hankam pada masa Orde Baru dimulai sejak 1966, setelah Soeharto diangkat sebagai Ketua Presidium Kabinet merangkap Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Nasution secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa dari sanalah pertanda militer akan mulai masuk ke dalam peranan sosial politik. Pada perkembangannya, ABRI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Presiden berasal dari ABRI, dan juga banyak menteri yang berasal dari ABRI. Bahkan pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an hampir semua gubernur dan bupati/walikota berasal dari ABRI, ditambah pula dengan adanya Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang mempunyai peran yang cukup besar pada waktu itu. Partai-partai politik pun menjadi kurang berpengaruh dan mengalami intervensi dari pihak militer untuk menjamin agar pemimpinnya tidak mengganggu stabilitas politik (Haris dalam Kasenda, 2013, p. 152). Selain itu, pengaruh yang cukup besar dalam implementasi

peran sosial politik ABRI ini juga sangat terasa dalam parlemen. Berawal dari Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 mengenai pembentukan DPR baru yang disebut DPR-GR (Gotong Royong). Komposisi DPR-GR adalah 130 orang wakil dari partai politik dan 152 orang dari perwakilan golongan fungsional (karya) serta seorang wakil dari Irian Barat. ABRI memperoleh jatah 35 kursi sebagai bagian dari golongan fungsional (karya) angkatan bersenjata. Ini merupakan saat pertama ABRI memiliki wakil dalam lembaga legislatif. Posisi ini kemudian diikuti dengan penempatan wakil ABRI di DPRD, baik di daerah tingkat I maupun tingkat II. Pada perkembangan berikutnya, posisi ABRI di parlemen semakin kuat. Masa Orde Baru dibawah Soeharto ini menempatkan ABRI dalam posisi yang strategis. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah kursi ABRI di DPR pun mengalami peningkatan. ABRI memperoleh jatah 100 kursi, sedangkan di DPRD I dan DPRD II ABRI memperoleh 20% jatah kursi dari total anggota yang ada dalam lembaga perwakilan tersebut. Posisi ABRI yang menjadi mayoritas di parlemen pun mau tidak mau ikut mempengaruhi dari setiap kebijakan yang dihasilkan.

Secara tidak langsung, Soeharto mengendalikan lembaga legislatif ini melalui anggota-anggota ABRI yang duduk di parlemen. Sehingga kebijakan - kebijakan yang bisa mengancam stabilitas pemerintahannya pun bisa di minimalisir dengan adanya peran militer di dalamnya. Dengan masuknya ABRI dalam parlemen, maka semakin memperkokoh kedudukan dan posisi militer, serta pengaruh militer dalam bidang sosial politik

Pada awal mulanya militer menganggap partai politik sebagai pesaing dalam memperoleh kekuasaan, menggerakkan keresahan dan keributan. ABRI

menempatkan dirinya sebagai basis pancasilais yang mendorong sinergi penyeimbangan di Indonesia. Ia menganggap adanya partai sebagai basis kekuatan yang pro kiri (komunis) dan basis ekstrim kanan (islam). Para basis ini telah menyeret Indonesia beberapa kali ke dalam jurang keamanan dan ketidakstabilan negara.

Dukungan dari militer adalah salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam format politik Soeharto (Kasenda, 2013). Dengan militer, Soeharto mempertahankan posisinya lebih dari 32 tahun dengan dominasi ABRI dalam dunia politik Indonesia menggunakan ideologi dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI yang diperkenalkan oleh Nasution pada tanggal 18 November adalah suatu cara untuk melegitimasi peran sosial politik militer ABRI secara permanen dan langsung dalam lembaga politik, birokrasi dan organisasi non politik.

Dwifungsi atau kekaryaan ABRI bermaksud untuk mengendalikan secara langsung dan menjustifikasi penempatan tentara di berbagai jabatan politik, birokrasi dan perusahaan negara bahkan juga organisasi perwakilan kelompok. Seorang jenderal menempati jabatan eselon satu dengan posisi Irjen (Inspektur Jenderal), sekjen (Sekretaris Jenderal) dan dirjen (Direktorat Jenderal). Birokrasi seperti ini bertugas untuk melayani kepentingan pembuat keputusan. Birokrat ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto dan menempatkan kepentingan rakyat di posisi yang lebih rendah. Jika ia merekrut warga sipil dan para profesional untuk mengisi jabatan birokrasi, mereka tidak akan seloyal tatar kepada Soeharto.

Soeharto tidak hanya berhasil memanfaatkan sisi birokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan tapi juga menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Para perwira ABRI juga bersatu menjadi satu fraksi ABRI di DPR. Kedudukan fraksi ABRI ini sejajar dengan fraksi tiga partai lain yaitu Golkar, PPP dan PDI. Setelah sebelumnya sukses melakukan fusi partai dan menjadikannya tiga partai.

Proses ini merupakan proses yang diambil supaya tidak terjadi pembangkangan dan oposisi yang dilakukan partai politik di pemerintahan. Bahkan Golkar saja yang merupakan bentukan militer, tidak lepas dari intervensi Soeharto dengan menempatkan berbagai purnawirawan militer di kepengurusan.

Soeharto harus membuat langkah selanjutnya apabila ingin terus berada di kursi presiden dengan cara yang legal agar tidak terjadi protes di kemudian hari. Kelahiran Golkar, lahir dengan kekuatan besar yang menopangnya. Golkar menjadi partai semu yang melegitimasi kepentingan soeharto dan mempertahankan Dwifungsi ABRI. Golkar memiliki *sense of mission* yang mewakili kepentingan ABRI yang tidak dapat diakomodasi oleh partai lain.

Soeharto mengeluarkan instruksi kepada keempat staf ABRI , pada tanggal 5 September 1966 untuk menyediakan semua fasilitas dalam mengembangkan Sekber Golkar dan pelaksanaan tugasnya baik ditingkat nasional maupun lokal (Kasenda, 2013). Sekber Golkar pada tahap selanjutnya direvitalisasi untuk menjamin posisi dominan ABRI. Orang-orang Soekarno yang masih berada di tubuh ABRI pun perlahan dikikis oleh loyalis Soeharto. Langkah kemajuan Golkar yang dibina oleh Soeharto terlihat pada Mukernas 1 Golkar di Jakarta. Nasution,

sebagai orang kepercayaan Soeharto berhasil menduduki jabatan sebagai Pembina Golkar dan perwira militer menjadi anggota yang dominan menduduki susunan kepengurusan partai.

Dalam waktu yang relatif singkat. Pengurus Sekber Golkar telah berhasil mengadakan konsolidasi sampai ke daerah pelosok seluruh negeri. Hal ini lantaran, para pengurus Sekber dari daerah tingkat I dan daerah tingkat II dijabat oleh purnawirawan dan ABRI yang masih aktif. Sekber Golkar pun kemudian menjadi kendaraan perwira ABRI untuk memenangkan pemilihan umum melanggengkan Soeharto di kursi Presidennya.

Kehadiran Golkar dianggap sebagai *buldozzer* yang memiliki kekuatan menggilas basis masa. Power yang dimiliki Golkar dapat dirinci dengan tiga hal. Pertama, Golkar mendapat dukungan ABRI. Kedua, birokrasi yang dibentuk oleh mendagri saat itu memunculkan 'mono-loyalitas' Pegawai negeri kepada Golkar, dengan diakomodasi oleh KORPRI. Ketiga, Golkar dijadikan alat melanggengkan kekuasaan dengan formulasi sistematis dengan tata cara dan prosedur yang diatur sedemikian rupa untuk memenangkan pemilihan umum.

Pembentukan partai Golkar adalah sebagai jawaban dari keterlibatan ABRI secara terbuka dalam partai politik dan organisasi kemasyarakatan karena ABRI menganggap partai politik pada saat itu sebagai sumber kekacauan dan penyebab ketidak stabilan (Kasenda, 2013). Maka, ABRI membuat barisan baru yang menjadi lokomotif yang mendukung program-program ABRI dan menjadi jaminan bahwa ABRI akan menjadi kelompok yang berdiri diatas golongan yang lain.

Ideologi yang digembar-gemborkan pada masa Soeharto demi kepentingan politiknya adalah revitalisasi asas tunggal ideologi Pancasila dan UUD 45 (Kasenda, 2013). Konsep asas tunggal Pancasila bermula pada pidato Soeharto yang telah menjabat presiden di Pekanbaru dalam pembukaan rapim ABRI, pada 27 maret 1980. Soeharto dalam pidatonya menginginkan agar Pancasila dan UUD 45 menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar tidak disalah gunakan oleh berbagai kekuatan baik ekstrim kanan (Islam) maupun ekstrim kiri (komunis).

Pemerintahan Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berdasarkan pengalaman politik masa beberapa pemilu sebelumnya. Pada pemilu tahun 1977, terjadi pertarungan antara partai Golkar dan partai Islam. Maka, dalam rangka mengkerdilkan kekuatan PPP sebagai basis kekuatan politik islam, penataan kesatuan identitas primordial perlu di kikis.

Noer (1983) mengatakan; 1) asas tunggal partai menafikan kebhinnekaan masyarakat berkembang menurut kepercayaan masing-masing yang bersumber pada ajaran agama; 2) asas tunggal partai menghalangi orang-orang dengan keyakinan yang sama untuk bertukar pikiran berdasarkan keyakinannya; 3). Asas politik tunggal menafikan hubungan politik dengan agama; 4) asa tunggal mengarah kepada pengembangan partai tunggal dan 5) asas tunggal menghalangi pengembangan paham-paham yang bersumber dari agama.

Pola yang digunakan dalam mengendalikan PPP dan PDI memang tidak secara langsung. Namun, melalui intervensi yang lebih halus dengan mengurangi popularitas partai di mata pemilih melalui berbagai ketentuan *floating mass*, asas

tunggal Pancasila dan perubahan tanda gambar. Pada saat yang sama aktivitas dan sukses kepemimpinan partai nya dibatasi dan dikendalikan melalui pihak organisasi sosial yang tersebar di departemen keamanan, departemen dalam negeri dan struktur komando teritorial intelijen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, masyarakat yang berpotensi sebagai kekuatan koreksi dan kontrol terhadap pemerintah di tumpulkan melalui pembekuan organisasi kemasyarakatan dan perwakilan tunggal (Kasenda, 2013). Kelompok populer seperti buruh, tani, kaum intelektual disingkirkan dari proses politik dengan strategi korporatis dimana militer yang menjadi pemegang kendalinya bahkan sampai menjadi ketua berbagai organisasi tersebut.

Setelah Soeharto berhasil menumpas PKI pada 1965 dengan kekuatan militer dan dibantu kekuatan politik Islam (Kasenda, 2013). Namun, muncul kekecewaan di kalangan kaum muslim atas upaya sistematis dalam memarjinalkan kelompok muslim. Soeharto menolak untuk menghidupkan kembali Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) yang dibubarkan pada masa Soekarno. Namun mengizinkan pendirian PARMUSI (Partai Muslim Indonesia) dengan pengawasan ketat. Pada saat yang sama Soeharto melarang bekas pemimpin Masyumi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik maupun mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Hal ini mengindikasikan; 1) bahwa Soeharto mencegah naiknya kembali Islam politik dalam panggung negara; 2) Soeharto dan pada pengikutnya ingin mengeluarkan Islam dari politik sejak awal.

Pada tahun 1980 usaha melemahkan PPP bukan hanya pada penggantian asas tunggal saja, namun juga dengan menempatkan tokoh kontroversi pro Soeharto

seperti John Narto dalam NU yang merupakan basis suara PPP. Soeharto merasa adanya bahaya dari berbagai manuver politik yang dilancarkan oleh NU. Pada akhirnya, Soeharto berhasil memarjinalkan NU dari PPP dan membuatnya keluar dari dunia politik praktis dan sekaligus membuat daya tarik PPP menurun bagi kelompok fundamentalis (Kasenda, 2013, p.75).

Keluarnya NU dianggap sebagai keberhasilan fundamentalis dalam menyingkirkan oposisi ekstrim kanan yang paling kritis dan vokal di legislatif. Inilah babak puncak kekuasaan era Soeharto dalam rivalitasnya dengan Islam politik. PPP khususnya, mengalami kemerosotan tajam dari 27,2 % menjadi 16 % pada pemilu 1982. proyek selanjutnya adalah merusak basis Islam politik di masyarakat. Soeharto memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk mengeliminasi ratio PPP sebagai basis Islam. PPP mengganti lambang partainya menjelang pemilu tahun 1987 (Kasenda, 2013, p. 75-76). Dengan tidak aktifnya NU dalam kegiatan politik, ia berhasil menyingkirkan elemen Islam tradisional yang berbasis kuat NU di ranah legislatif setelah sebelumnya berhasil mengenyahkan unsur Islam modernis di Masyumi. Dengan ini, Soeharto menegaskan bahwa era Orde Baru bahwa Islam negara sudah lumpuh.

Latar belakang pelemahan PPP adalah suara yang mencengangkan pada pemilu 1977(29%). Mencuat kekhawatiran pemerintah, bahwa partai ini bisa berkembang dan menjadi oposisi Islam yang kuat. Atas dasar inilah, Soeharto bersama ahli strategisnya Ali Moertopo, membuat rencana strategis melalui dua kebijakan kembar (Kasenda, 2013). Pertama, menampilkan citra politik yang lebih Islami dengan membentuk organisasi Islam di bawah sayap Golkar, menyusup ke

organisasi-organisasi terdekat dan penyuaip para kiyai dan menjadikan pesantrennya pesantren Golkar. Kedua, melancarkan operasi intelijen menyudutkan Islam politik dengan menumpas kekuatannya. Mereka melakukan teror halus, dan mengawasi pengajian masjid, kelompok keagamaan dan aktivitas lainnya pengajian lainnya.

Pemerintah secara bertahap membentuk organisasi korporatis yang mencakup kaum buruh (SPSI), ulama Islam (MUI), Kaum muda (KNPI), guru (PGRI), pengusaha (KADIN), wartawan (PWI), baik secara langsung maupun tidak langsung berada berseberangan sayap Golkar. Strategi ini diperluas hingga keseluruhan lapisan sosial untuk menetapkan basis dan keamanan sosial dalam bentuk lain (Kasenda, 2013). Tujuan utamanya adalah mengendalikan wakil-wakil dari kelompok masyarakat agar tidak menimbulkan konflik maupun mengancam kekuasaan pemerintahan.

Sarana korporatis ini yang pertama adalah perkumpulan yang mewakili kepentingan pegawai negeri. Departemen dalam negeri mendirikan Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri (Kokar Mendagri), memonopoli pamong praja dan mengerahkan pamong praja untuk suksesi pemilu 1971 (Kasenda, 2013).

Sasaran kedua korporatis ini adalah kaum buruh. Pasca pemilu pendirian organisasi dibawah Golkar diperluas ke arah organisasi kantoran lainnya seperti Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI). Tekanan yang Soeharto berikan pada kontrak kerja melalui FSBI, berfungsi untuk memberikan ketentraman kerja dan menjadi kontrol sosial. Hal ini menjadi salah satu tujuan penting dalam mempromosikan hubungan sosial kekeluargaan antara rakyat dan pemerintah.

Sasaran terakhir adalah sektor bisnis. Pemerintah mendirikan Kamar Dagang (Kadin) dalam rangka mengkoordinasikan lembaga bisnis dan menjadi perantara pemerintah dan seterusnya menjadi wakil tinggal kepentingan bisnis.

Strategi membangun korporatis ini juga bertujuan untuk memutus benang merah antara partai politik dengan masyarakat (Kasenda, 2013). Menempatkan perwira ABRI dalam struktur kepengurusan berbagai organisasi masyarakat merupakan tindakan dilemahkan secara langsung dalam upaya pelemahan basis partai non Golkar. Satu sisi, tindakan-tindakan seperti ini menciptakan stabilitas politik yang mendukung investasi asing dan pembangunan ekonomi. Namun juga, membungkam hak-hak masyarakat berpartisipasi dalam urusan negara.

Langkah-langkah penyederhanaan partai politik dari yang awalnya berjumlah 10 partai menjadi 2 partai. Kelompok sekuler, materil spiritual melakukan fusi dan membentuk partai demokrasi Indonesia (PDI). Kedua kelompok politik Islam membentuk PPP (Kasenda, 2013). Dengan ini, terdapat tiga partai yaitu PDI, PPP dan Golkar. Adanya fusi ini menguntungkan Golkar secara langsung.

Tak cukup dengan penerapan asas tunggal, pengawasan ketat terhadap partai politik, Soeharto juga menerapkan konsep dipolitisasi daerah pedesaan dan pembentukan konsep massa mengambang yang melarang didirikannya kantor partai di desa dan kecamatan. Strategi ini menempatkan masyarakat diluar jangkauan efektif dua partai non pemerintah (PPP dan PDI) (Kasenda, 2013). Demi kepentingan pemilu, hanya partai Golkar yang mampu dan boleh mengorganisir diri di tingkat desa dengan bantuan resimen ABRI. Semua langkah ini dikerahkan untuk

memastikan PPP dan PDI tidak berada dalam posisi yang akan mengancam pemerintah. Satu satunya saluran yang menghubungkan masyarakat dengan sistem politik adalah ormas non partai yang dikendalikan oleh pemerintah.

Adanya tujuan massa mengambang adalah untuk mengakhiri secara permanen segala bentuk politik mobilisasi terbuka dari partai selain Golkar (Kasenda, 2013). Budaya mobilisasi politik ini dilakukan di setiap komando teritorial Angkatan bersenjata. Pos komando ditempatkan di seluruh desa dengan tujuan mengawasi dan menjamin aktivitas politik partai dilaksanakan dengan ketat. Peran masa sangat dibatasi hanya saat mencoblos saat pemilu saja. Tak heran, masa mengambang PPP dan PDI tidak pernah bisa menandingi Golkar disamping modal politik yang sangat besar juga.

ABRI Terlibat dalam partai politik dan organisasi kemasyarakatan sejak saat rezim Soeharto membentuk partai Golkar (Golongan Karya) sebagai wadah politik praktis anggota ABRI. Partai ini dibentuk pada tahun 1964. Golkar dibentuk dengan berbagai alasan. Diantaranya, pada saat itu, partai-partai yang ada dipandang oleh ABRI, sebagai sumber kekacauan yang meresahkan, melemahkan pemerintah dan penghambat pertumbuhan bangsa dan sumber ketidakstabilan politik. Maka karena itu, para perwira ABRI merasa perlu melembagakan secara formal wadah politik untuk melegitimasi kebijakan yang mereka buat di pemerintahan.

Pada tahun 1982 simbol-simbol keagamaan dan primordial yang cukup besar menjadi kekuatan kampanye dan mengalahkan isu-isu lain yang penting untuk diperdebatkan (Kasenda, 2013). Hal ini menyulut Soeharto dan ia

menganggapnya sebagai bentuk ancaman yang akan berbahaya jika tidak segera di tangani sejak dini. Presiden Soeharto melalui Tap MPR No.11/MPR/1983 Pasal 3 Bab IV memutuskan demi memelihara, memperkuat dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan bangsa, seluruh partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan hal ini, pemerintah menghapus asas khusus dan karakteristik “islam” yang menjadi landasan PPP, dan “Demokrasi, Nasionalisme dan keadilan sosial” bagi partai PDI. Proses ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga stabilitas dan polarisasi politik yang diakibatkan oleh fanatisme tajam suatu kelompok. Dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, pemerintah ingin menghilangkan antagonisme politik diantara kekuatan-kekuatan sosial, sehingga pemerintah bisa mencurahkan energi dan pikirannya terhadap pembangunan nasional.

Kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila mendapat berbagai reaksi. Korps pegawai negeri menerima dengan baik, menyetujuinya dengan baik dengan alasan mengurangi ketegangan politik di masyarakat, memperkuat kesatuan dan mendukung pembangunan nasional juga dapat mengurangi ketegangan perselisihan ideologi. Khususnya nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim (Kasenda, 2013).

Nasionalis sekuler berpendapat penerapan asas tunggal Pancasila ini bukan hal yang sulit karena tidak banyak pertentangan dengan AD/ART Organisasi. Namun berbeda dengan partai seperti PPP, harus mendefinisikan ulang identitasnya karena harus membuang kata ‘islam’ sebagai basisnya dan menggantinya dengan Pancasila.

Dalam perkembangannya, PPP pada akhirnya menerima asas tunggal Pancasila. Hal ini bagi merupakan deislamisasi politik. Partai Islam mendapat kekelaman dengan adanya perubahan asas tunggal dan pergantian lambang partai. Karena gambar Ka'bah yang awalnya menjadi lambang PPP dianggap tidak Pancasila dan harus diganti dengan gambar bintang.

Ruth McVey dalam Kasenda (2013, p. 110) mengatakan rezim Soeharto melakukan manipulasi dan re-definisi terhadap Pancasila menjadi milik pribadi dan kepentingan-kepentingan politiknya. Terjadi perubahan karakter Pancasila yang dimanipulasi diikuti oleh sanksi yang mengatasmakan negara dan sifat hegemoninya.

Pemerintahan Soeharto secara teratur melakukan mekanisme sistem demokrasi yang sistematis yang telah didesain untuk melanggengkan dominasi militer dalam politik. Pemilu digelar setiap lima tahun sekali sejak 1971 dengan Golkar sebagai mesin pemerintah (Kasenda, 2013, p. 82).

Mitra politik militer diluar partai politik adalah gerakan mahasiswa, mereka bersama-sama menggerus kekuasaan Soekarno. Namun, hubungan baik ini mulai memburuk dan puncaknya terjadi peristiwa Malari. Dimana terjadi bentrokan antara mahasiswa dan militer akibat dari kritis dan unjuk rasa yang di tunjukan kepada pemerintah atas ketidak setujuan dominasi modal asing, eksekusi-eksekusi strategi pembangunan dan ketimpangan sosial ekonomi. Konflik ini juga merupakan kesadaran masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan ekonomi pribumi. Pangkopkamtib mengupayakan manipulasi realitas

konflik atas insiden ini, pemerintah merekayasa versi kejadian dengan membatasi informasi media massa dengan tindakan represif (Kasenda, 2013, p. 82).

Setelah pemilu 1977, banyak surat kabar yang dibredel oleh pemerintah seperti kompas, sinar harapan, merdeka, Indonesia Times, sinar pagi, pelita dan masa kini. Walaupun diizinkan terbit, banyak pemimpin redaksinya yang dipaksa membuat surat pernyataan yang tidak provokatif dan tidak banyak mengkritik pemerintah (Kasenda, 2013, p. 83).

Peristiwa Malari khususnya, memberikan pembelajaran tersendiri kepada rezim Soeharto (Kasenda, 2013, p. 84). Bahwa, potensi radikalisme masyarakat perkotaan amat tinggi dan dapat menggoyahkan kekuasaan negara. Cara mengatasinya adalah dengan memperkuat solidaritas blok kekuasaan sekaligus depolitisasi masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan perubahan kekuasaan. Terjadi pemusatan kekuasaan yang tak terbendung di tangan Soeharto sebagai struktural kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali komando angkatan bersenjata.

Dengan terjadinya aksi Malari juga, menyadarkan rezim Soeharto bahwa perlunya melakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini bertujuan untuk membuat eksistensi Dewan mahasiswa dibekukan diseluruh universitas dan mengawasi semua kegiatan mahasiswa dibawah kontrol ketat Rektor. Semua bentuk kegiatan mahasiswa harus mendapatkan izin Rektor yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintah. NKK ini efektif meredam aktivitas mahasiswa yang melakukan protes terhadap pemerintah.

Undang-undang asas tunggal menimbulkan berbagai reaksi khususnya dari mayoritas muslim (Kasenda, 2013). Salah satunya terjadi reaksi kekerasan dan pembantaian di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara 12 September 1984, ketika militer menghujani masa demonstran dengan tembakan. Hal ini mengakibatkan banyak sekali demonstran muslim yang tewas di tempat. Dan banyak lagi peristiwa lainnya yang menunjukkan ketegangan antara umat Islam dengan militer akibat perbedaan antara gagasan asas tunggal sebagai ideologi formal dengan Islam sebagai ideologi informal sebuah komunitas yang menjadi panutan masyarakat.

Selepas peristiwa Tanjung Priok, pemerintah melakukan peningkatan intensitas pemantapan sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal. Pemerintah melakukan berbagai pendekatan persuasif kepada umat Islam dan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh umat Islam. Sehingga, diharapkan *demonstration effect* menurun dan tidak terjadi pengentalan sikap menolak kebijakan asas tunggal Pemerintah. Pendekatan ini juga dalam rangka memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap kalangan khususnya umat Islam bahwa asas tunggal tidak berarti mensinkronisasikan Islam dibawah Pancasila (Falah dalam Kasenda, 2013, p. 89).

Perlindungan rezim Soeharto terhadap Pancasila dan UUD 45 sangat rinci. Dari konsensus nasional, tidak mungkin ada Kelompok yang dapat mengubah Pancasila. Ia mengajukan Pancasila sebagai identitas negara.

Dominasi ABRI dalam birokrasi menempatkannya dalam jabatan yang penting. ABRI menduduki jabatan yang membuat kebijakan baik di tingkat pusat juga di daerah (Kasenda, 2013). Akibatnya, semua pengangkatan jabatan di

berbagai tingkat bergantung pada persetujuan ABRI, seperti masalah perizinan, kontrak, proyek. Perwira ABRI yang ditempatkan di berbagai tingkat ini pun akan lebih mementingkan kepentingan kelompok ABRI dibanding kepentingan masyarakat setempat.

Masalah penempatan ABRI di lembaga legislatif bukan hanya pada jumlah kursinya juga banyaknya personil ABRI yang menjadi ketua DPR diberbagai daerah sehingga terjadi penghambatan penyaluran aspirasi masyarakat (Kasenda, 2013). Di DPR pusat, ABRI mendapatkan 75 kursi dan 20% untuk F-ABRI di DPR I dan DPR II. Jika dibandingkan dengan sistem proporsional yang dipakai dalam pemilihan umum, 1 anggota DPR I mewakili 10.000 dan 20.000 untuk DPR II. dilihat dari angka ini, representasi ABRI di lembaga legislatif sangat berlebihan.

Sementara itu ABRI juga cukup dominan dalam campur tangan di lembaga ormas. Seperti kepengurusan yang harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan ABRI (Kasenda, 2013). Selain itu, ABRI juga memiliki beberapa organisasi dibawah sayapnya seperti kepemudaan (FKPPI), purnawirawan (pebABRI), istri-istri anggota ABRI (Dharma Pertiwi). Aktivitas ini intensif melakukan kegiatan baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan.

Peranan ABRI dalam bidang ekonomi dimulai saat terjadi darurat nasional dengan isu nasionalisasi perusahaan asing di era demokrasi parlementer (1949-1959) tugas kekaryaan ABRI pada saat itu adalah untuk mengamankan usaha penguasaan perusahaan asing oleh buruh yang tergabung dalam SOBSI (Sentral organisasi buruh seluruh Indonesia (yang berafiliasi dengan PKI) (Kasenda, 2013). Pada rezim Soeharto, tugas ABRI pada bidang ekonomi terlihat dominan pada

pembangunan Lima Tahun (Pelita), untuk mengamankan momentum pembangunan. Namun, pada pelaksanaannya, Permana ABRI merambah ke berbagai sektor yang menimbulkan berbagai reaksi.

3. Ekonomi Pemerintahan Soeharto

Menjelang akhir 1960, para teknokrat yang ahli dalam bidang ekonomi berhasil mengusulkan berbagai kebijakan yang dapat menurunkan laju inflasi. Pemerintah Soeharto pun terus melakukan komunikasi dengan para kreditur luar negeri. Menjelang akhir tahun 1969, pemerintah Soeharto memiliki tujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi Negara (Kasenda, 2013).

Ada dua undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Soeharto khusus untuk merumuskan konsep kebijakan sesuai dengan resep liberal dalam mengelola perekonomian, yaitu; UU/1/1967 mengenai penanaman modal asing dan UU no 6/1968 mengenai penanaman modal dalam negeri. Inti penting dari kedua undang-undang ini adalah; 1). Sebagai jaminan tidak akan ada nasionalisasi aset perusahaan luar negeri, namun apabila ada kompensasi yang pantas akan diberikan; 2). Masa waktu kontrak perusahaan asing selama 30 tahun dan dapat diperbaharui; 3). Terdapat pembebasan bea masuk dan cukai pada periode tertentu; 4). Menjamin bahwa perusahaan asing dapat mengelola manajemennya sendiri serta memilih tim teknis mereka juga dengan leluasa membawa ketangan dan modal mereka.

Dengan menggunakan formulasi yang memastikan liberalisasi, hal ini juga menenteramkan para nasionalis yang mengawasi Jakarta tunduk atau tidaknya pada tekanan Barat. Malah, undang-undang baru ini sangat liberal dalam konteks sejarah perekonomian Indonesia. Jika pada periode pemerintahan sebelumnya, Indonesia

memungkinkan mengambil alih modal asing, pada periode ini kemungkinan itu ditutup perlahan-lahan. Walaupun demikian, segala persoalan ini menjadi pintu terbuka pemerintah dalam memudahkan arus masuknya investasi asing. Nilai investasi asing yang hanya sekitar 3 juta dollar AS pada 1968 meningkat menjadi 130 juta dollar AS pada tahun 1973. Kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 1970-1971 diluar proyek minyak, perbankan dan asuransi menjadi 302 juta dollar AS.

Terdapat pula undang-undang yang lebih mengutamakan keamanan jalannya investasi di Indonesia, seperti UU PMA NO 1/2967 yang menyatakan bahwa Perusahaan Indonesia paling setidaknya memiliki 51% saham untuk setiap penanaman modal dalam negeri. Persentase tersebut meningkat pada tahun 1971 menjadi 75%. Undang-undang ini juga membatasi nondomestik untuk menjangkau beberapa sektor seperti pertambangan, perbankan dan kehutanan.

Selanjutnya, terdapat UU PMDN yang memuat berbagai aturan yang menguntungkan, seperti peluang pembebasan dan keringanan pajak bagi perusahaan domestik. UU ini berhasil mendorong lebih banyak perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam perekonomian Indonesia. Investasi dalam negeri yang berhasil terkumpul dan disetujui sebesar 13, juta dollar AS, meningkat pada tahun 1968 menjadi 319 kemudian melonjak menjadi 1.465 juta dollar AS.

Namun, undang-undang yang dikeluarkan untuk membahas regulasi dengan pihak asing dianggap terlalu bermurah hati menurut para pelaku bisnis Indonesia. Investasi asing yang terlalu besar akan menghancurkan industri ekonomi dan menciptakan daerah kantong dengan pola konsumsinya yang asing bagi

masyarakat Indonesia. Sebagai alternatifnya diusulkan strategi pembangunan ekonomi yang padat kerja suka kemandirian terhadap teknologi menengah. Tujuannya adalah untuk pemerataan dan kemandirian yang lebih besar.

Lain halnya, Mahasiswa Indonesia berpendapat bahwa modal asing hanya menguntungkan satu kelompok minoritas di Indonesia. Harusnya, modal asing yang diterima oleh Indonesia di gunakan untuk kepentingan khalayak (Kasenda, 2013).

Hubungan yang dijalin oleh Soeharto bukan hanya dengan pihak AS, namun juga dengan pihak Jepang. Hal ini menjadi warisan kebijakan Soekarno yang dipertahankan oleh Soeharto. Hubungan kedekatan Jepang-Indonesia, terlebih dengan pernikahan Soekarno dengan seorang warga negara Jepang membuat hubungan kedua negara semakin meningkat. Pada akhirnya Jepang setuju untuk membayar rampasan perang. Uang dari hal ini digunakan oleh Soeharto untuk mengeksekusi proyek modernisasi pembangunan hotel di Bali. Begitu pula para asisten kepercayaan Soeharto, seperti Ali Moertopo yang juga menjalin hubungan yang baik dengan Jepang agar mendapat investasi dan akses ke data bantuan Jepang.

Berbagai kebijakan dan jalinan luar negeri menimbulkan efek tersendiri bagi masyarakat Indonesia (Kasenda, 2013). Khususnya para mahasiswa, mereka lebih menentang jalinan hubungan luar negeri yang terkait ekonomi dan melakukan demonstrasi. Proses mahasiswa ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 yang kemudian disebut dengan peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari). Terjadi kerusuhan di Jakarta, para demonstran mengincar pabrik dan perusahaan luar

negeri, Mereka melakukan penjarahan pembakaran gedung ,pemeriksaan dan kegiatan rasis lainnya.

Reaksi pemerintah terhadap peristiwa ini sangat cepat, Ali Moertopo menjadi komandan yang mengarahkan bawahannya untuk segera mengambil alih keadaan. Ali Moertopo melakukan operasi khusus untuk menangkap para pelaku demonstran, memenjarakan dan diadili. Kejadian menjadi pembelajaran bagi pemerintah Soeharto untuk selalu mengerahkan energi dalam mengontrol basis pengaruh liberal universitas, pers dan pegawai. Soeharto memberikan pelajaran tersendiri kepada para mahasiswa bahwa kekuatan legal dan ekstra legal pemerintah rezim Soeharto akan dikerahkan untuk menekan oposisi maupun kritik yang ditujukan kepada pemerintah.

Pemerintah Soeharto melakukan modifikasi ekonomi yang intinya memiliki dua tujuan (Kasenda, 2013); 1). Memperbaiki tekankan sosial dan ekonomi yang terus meningkat seiring pergantian tahun selama pemerintahan Soeharto dengan memberikan kredit dan proteksi bagi para Borjuis kecil pribumi sesudah kejadian Malari. Pemerintah Soeharto terpaksa melakukan perluasan basis sosial ekonomi, dengan cara menyatukan para kapitalis pribumi; 2). Memodifikasi kebijakan ekonomi demi menyelaraskan legitimasi terhadap ideologi kekuasaan. Rezim Soeharto dengan ini membatasi modal asing dan Tionghoa dalam rangka menjadikan pemerintahannya sebagai pemerintah yang nasionalis dan populis.

Setelah kejadian Malari, terdapat perubahan penting dalam kebijakan investasi dan perkreditan yang meliputi; 1). Saham kapital perusahaan patungan baru secara progresif dialihkan pada mitra Indonesia hingga 51% dalam jangka

waktu 10 tahun; 2). Proyek investasi asing yang bentuknya patungan harus dilakukan dengan mitra pribumi; 3). Jika mitra lokal bukan pribumi, maka 50% saham nasional di tangan kaum pribumi Indonesia; 4). Proyek investasi bagi modal asing bertambah jumlahnya dengan mempertimbangkannya potensi investasi domestic; 5). Kredit investasi bank pemerintah hanya bagi pribumi; 6). Proyek investasi domestik diminta memenuhi 75% saham pribumi. Peraturan seperti ini memberi perubahan penting dan pergerakan mendasar dalam sistem pasar bebas yang berhubungan dengan kapal domestik dan kapital internasional.

Setelahnya, modal asing lebih banyak dialokasikan dalam proses akumulasi kapital domestik (Kasenda, 2013, p. 56-57). Ironisnya, bukan kaum pribumi yang mendapat keuntungan dari regulasi ini, melainkan perusahaan negara yang bergerak lebih kuat berhadapan dengan modal asing.

Investasi asing juga dilarang dalam berbagai kegiatan ekspor-impor berbagai macam produk manufaktur ringan seperti; pasta gigi, cat, dll (Kasenda, 2013). Setelah kejadian Malari, bidang yang dilarang semakin bertambah pada sektor kimia, baja, industri farmasi, bisnis *real estate*, konstruksi dan kehutanan. Beberapa dari proyek ini ada yang tertutup sebagian dan tertutup total. Pemerintah Soeharto banyak bertindak secara *ad-hoc* sekitar selama dua tahun dalam membatasi modal asing.

Pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan Draf Skala Prioritas (DSP) (Kasenda, 2013). Draf ini bertujuan untuk memformalkan dan merasionalkan penanam modal dan tujuan pembangunan jangka panjang pemerintah. Dengan sistem ini, sektor yang tertutup terhadap investasi asing bertambah seperti bidang

industri cengkeh, plastik, produk susu, perbankan dan pelayanan distribusi. Bertambah tertutupnya Indonesia terhadap modal asing di berbagai sektor membuat rasio investasi asing menurun dan tidak pernah mencapai tingkat seperti sebelumnya.

Namun, produk Domestik Bruto (PDB,) mengalami pertumbuhan riil di angka 7,3% tahun 1997 sampai 1980. Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga minyak dan pemasukan yang berlimpah untuk Indonesia (Kasenda, 2013). Bidang manufaktur juga mengalami pertumbuhan berkat investasi baru. Dengan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor ini, memberikan efek yang baik bagi Belanja Gaji (BG) pemerintah yang naik substansial dalam pos pengeluaran rutin.

Sistem politik yang diterapkan pemerintah Soeharto adalah sistem terpusat dan terkendali terutama pada tahun 1980-an (Kasenda, 2013). Adanya kejadian Malari, dibalik banyaknya korban dan kekacauan yang terjadi, dapat membuat Soeharto mampu mengonsolidasikan kekuatannya dan menerapkan berbagai pembatas politik dengan menggusur faksi yang berseberangan dengan militer, mengoptimalkan Golkar sebagai kendaraan pemilu dan mengontrol birokrasi.

Soeharto berhasil naik pada puncak piramida kekuasaan internal yang menjadi kunci stabilitas nasional. Ia mengendalikan dan mengatur aparat pemerintah tanpa tantangan yang berarti. Semua keputusan penting perihal Indonesia datang dari atau melalui otokrat keturunan Jawa ini. Dalam cakupan tertentu, para pejabat memang diperkenankan menyuarakan kritik dan sarannya, tetapi pada akhir tetap ditangan Soeharto lah keputusan diambil (Kasenda, 2013).

Sistem yang terpusat dan dominan ini, membuat para perwira Angkatan Darat juga kuat berseberangan payung Soeharto. Militer menyediakan dukungan basisnya yang bersifat represif, kuat dan kompak untuk mengontrol masyarakat juga menjaga kepentingan umum. Selain Golkar, birokrasi, militer dan sekretariat negara, kewenangan menjalankan kekuasaan juga diberikan kepada cabang - cabang penting di pemerintahan Soeharto.

Soeharto berada pada puncak kekuasaan, tidak ada siapapun yang dapat menentanginya (Kasenda, 2013). Pembangunan ekonomi yang kokoh semakin memperkuat posisinya. Orang yang berada di belakang Soeharto dalam memutuskan kebijakan ekonomi antara lain; Widjojo Nitisastro, Soehartonom dan Habibie, yang merupakan kelompok teknokrat, Soedharmoni dan Ginanjar Kartasmita yang berasal dari kelompok insinyur. Mereka ini adalah tim yang harus terus kerjasama dalam melaksanakan agenda ekonomi Soeharto.

Peristiwa Malari dan Bonanza minyak juga membuat pemerintah memperluas kebijakan sentralistiknya dalam berbagai bidang industri dan infrastruktur, memberikan subsidi, membuka lapangan pekerjaan, kredit murah kepada sektor yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah (Kasenda, 2013). Soeharto menjadi agen perubahan dalam pembangunan penting sumber daya ekonomi pun semakin bertambah besar dan membawa Indonesia menjadi Masyarakat yang relatif sejahtera dengan GDP mencapai 25% pada awal 1980.

Keberhasilan ekonomi juga membuka peluang pemerintah untuk mengakomodasi dan mengkooptasi berbagai kepentingan masyarakat (Kasenda, 2013). Pemerintah memperluas basis pendukung dengan modal yang lebih besar.

Dapat dikatakan, bahwa pembangunan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaan Soeharto dan pemerintahannya.

Pembangunan Soeharto memiliki landasan yang dinamai trilogi pembangunan (Kasenda, 2013): stabilitas politik, pertumbuhan ekonominya dan pemerataan. Hingga Soeharto mendapat gelar kehormatan dari MPR dengan sebutan "Bapak Pembangunan". Soeharto juga menerima penghargaan lain berkat sistem pembangunan yang dibuatnya. Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras atas prestasinya yang mampu menghasilkan 25,8 juta ton beras pada tahun 1984 dan menjadi negeri pengimpor beras terbesar di dunia.

Swasembada beras berarti pemerintah mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri dengan menutup pintu ekspor (Kasenda, 2013). Hal ini berarti, pemerintah mampu menghemat devisa, memperluas kesempatan kerja, mensejahterakan petani dan merupakan kemajuan di bidang pertanian.

Namun, pada tahun 1982 harga minyak dunia merosot tajam dan menghantam ekonomi Indonesia. Kroni kapitalis Soeharto yang disinyalir berasal dari keluarganya merongrong ekonomi Indonesia. Mereka melakukan praktek rente (*renting seeking*) memakai negara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Banyak monopoli pemerintah dan susunan kartel yang merugikan negara. Seperti monopoli cengkeh yang diberikan kepada perusahaan Joint Venture pada 1991 dan dibebaskan pajaknya, jika proteksi pembebasan pajak pada perusahaan otomotif milik anak-anak Soeharto pada tahun 1996.

Soeharto menjadi contoh sendiri atas pribadi dan sistem yang ia bangun atas rasa aman, percaya diri politik dan prestasinya membuatnya berkiprah dengan keyakinan dan orientasi yang semakin besar di panggung dunia (Kasenda, 2013).

Soeharto akhirnya dikenal sebagai pemimpin yang baik, bahkan sampai dikatakan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Banyak para pemimpin negara lain ingin belajar darinya. Pengalaman ini membangkitkan dirinya dalam masalah kemiskinan di dunia. Khususnya kesenjangan antara Utara dan Selatan yang menurut Soeharto disebabkan oleh keegoisan barat. Perhatian baru Soeharto terhadap permasalahan dunia salah satunya dengan keputusannya membuka Timor Timur tahun 1988 dalam rangka memperkuat integrasi ekonomi dan sosial provinsi tersebut (Kasenda, 2013).

Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia bermula dengan adanya kampanye anti komunis oleh Ali Moertopo. Ali Moertopo menggalang relawan Indonesia untuk Timor Timur, ia diam-diam membangun kekuatan militer di sepanjang perbatasan dan menyiapkan jalan untuk invasi besar besaran Timor timur (Kasenda, 2013).

2.3.7 Keruntuhan Rezim Soeharto

Nasution, yang mencanangkan dwifungsi ABRI, adalah orang yang mengkritisi implementasi ideologinya sendiri (Kasenda, 2013, p. 122). Nasution menyatakan partisipasi angkatan bersenjata selaras dengan UUD 45 yang menjadi sebagai kekuatan sosial politik. Fungsi politik ABRI seharusnya hanya ada di MPR bukan di kegiatan politik sehari-hari. ABRI harusnya menjadi wasit politik antara partai politik.

Kritik terhadap rezim Soeharto dan tentara sebagai pendukungnya semakin marak pada tahun 1990-an (Kasenda, 2013, p. 120). Moerdani adalah orang kepercayaan Soeharto yang pernah menduduki berbagai jabatan penting. Seperti, badan intelijen, pangkopkamtib dan pangab. Pada tahun itu, Soeharto memandang ABRI di kuasai oleh Moerdani dan bisa digunakan sebagai peluru yang menghantamnya. Berbagai geliat Moerdani dianggap sebagai pengalihan loyalitas ABRI dari Soeharto kepada nya. Beberapa sumber disekitar Moerdani menjelaskan kekesalannya melihat tingkah anak-anak Soeharto. Serta perubahan politiknya yang merapatkan diri ke Islam. Moerdani secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya kepada Soeharto.

Moerdani dan para perwira ABRI lainnya tidak suka juga atas sikap Soeharto yang memberikan kesempatan besar kepada B.J Habibie dan kepada ketua Golkar Sudharmono. ABRI menilai, ketua Golkar Sudharmono membawa Golkar ke arah yang independen dan mempromosikan tokoh-tokoh sipil ke berbagai jabatan strategis, sehingga fungsi kontrol ABRI di Golkar melemah. Sementara Habibie tidak disukai karena banyak proyek yang asalnya dipegang oleh ABRI diberikan kepada Habibie oleh Soeharto.

Rusaknya hubungan Soeharto - Moerdani bukanlah fenomena baru dalam politik Indonesia. Lebih dari 30 tahun sebelumnya, hubungan presiden pertama, Soekarno dan jenderal nya Nasution mengalami nasib yang serupa (Kasenda, 2013).

Keadaan yang membuat buruk hubungan antar kedua presiden ini dengan masing-masing pemimpin tentaranya karena hilangnya musuh bersama mereka.

Pada masa Soekarno, ia dan Nasution bahu-membahu menghadapi tentara yang memberontak di Sumatera dan Sulawesi, memperkecil peran partai politik, dan memberlakukan kembali UUD 45 dan juga membangun pemerintahan otoriter di pemerintahan Soeharto. Setelah semua musuh kalah dan kekuasaan relatif stabil dan terkonsolidasi, peran Nasution tidak diperlukan lagi oleh Soekarno. Ia menyingkirkan jenderal nya itu dari posisinya pada bulan Juni 1962.

Pola ini berulang pada presiden selanjutnya. Soeharto mempercayakan Moerdani sebagai tokoh utama dalam mengonsolidasikan kekuatan Soeharto secara politis, ideologis dan ekonomis. Moerdani menjadi eksekutor dari rencana-rencana Soeharto. Namun, setelah musuh-musuhnya tersingkir dan asas tunggal Pancasila berhasil diterapkan juga meningkat pesatnya bisnis keluarga Soeharto, Moerdani tidak memiliki peran lagi. Soeharto akhirnya mencabut posisi nya dari pangab sebelum masa jabatannya berakhir.

Hubungan Soeharto - Moerdani makin keruh ketika pendirian ICMI mendapat restu dan dukungan Soeharto pada tahun 1991 (Kasenda, 2013). Pimpinan militer ini khawatir ideologis Islam yang dimiliki kelompok ICMI akan mendukung terbentuknya negara Islam, juga dukungan ini dianggap hukuman Soeharto kepada ABRI yang dikhawatirkan akan terjadi demiliterisasi ABRI di politik Indonesia.

Tak lama kemudian Soeharto membersihkan siapa saja yang dianggap sebagai pengikut Moerdani (Kasenda, 2013). Ia mengangkat Faisal Tanjung sebagai Pangab dan mengganti Edi Sudrajat dan mengangkat Hartini sebagai KSAD. Dua orang ini pada awalnya adalah orang-orang yang dibuang oleh Moerdani karena

datang dari subkultur santri. Pengangkatan kedua jenderal ini merubah perspektif Soeharto terhadap Islam. Pada masa kepemimpinan Moerdani di ABRI, perwira yang berlatar belakang santri terpinggirkan dan sulit mendapatkan promosi. Moerdani tidak bersimpati kepada Islam. Ironisnya ketika Moerdani berlawanan kubu dengan Soeharto, orang-orang yang di buang oleh Moerdani lah yang di pakai Soeharto memimpin ABRI. Namun, saat Soeharto mempromosikan jenderal-jenderal "hijau" ini, ia membuat penyeimbangya dengan mempromosikan juga jenderal "merah putih" seperti Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Hendropriyono untuk menduduki posisi penting di Militer.

Pertama kalinya sejak Soeharto memegang kendali, militer secara lantang berkeberatan dengan keputusan presiden (Kasenda, 2013). Dan berujung kekalahan di lembaga MPR. Hal ini membuat pemimpin-pemimpin militer memalingkan wajah dari partai Golkar yang dipegang oleh Sudharmono.

Soeharto secara terang-terangan menjauhi ABRI baik pada penunjukan anggota kabinet maupun pada kongres Golkar yang di Koordinasikan oleh B.J. Habibie (Kasenda, 2013). Soeharto kemudian merangkul kelompok sipil. Hal ini berarti, Soeharto ingin melakukan kontrol ketat agar Golkar tidak dimanfaatkan lawan politiknya untuk merongrong kekuatan ABRI. Soeharto mendukung B.J. Habibie dan Harmoko sebagai ketua umum Golkar, hal ini berhasil dilakukan karena Soeharto sendiri melakukan negosiasi pribadi. Anak-anaknya pun menduduki posisi wakil ketua di partai Golkar seperti Trihatmodjo di bendahara dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai wakil ketua. Sikap keras Soeharto yang mengabaikan ABRI menandakan pembekuan terhadap pihak-pihak yang

menentanginya. Soeharto nampaknya memutuskan masa depan politik Indonesia bukan pada tangan ABRI lagi. Menurut Soeharto, masa depan politik Indonesia bergantung pada wahana politik Golkar, Golkar yang dikendalikan oleh orang-orang yang dekat dengannya yang menawarkan kesetiaan tanpa batas kepada Soeharto.

Soeharto memiliki pandangan sendiri akan takdir politiknya dalam sejarah Indonesia (Kasenda, 2013). Ia mengupayakan kesempurnaan dalam penerbitan otobiografi yang ditulis orang lain pada tahun 1989. Dalam bukunya ini, ia beberapa kali menekankan peranan dan kontribusinya dalam pembangunan Indonesia yang melamban. Namun ia tak pernah mengeluh apalagi menyerah. Tugas besar ini ia anggap sebagai tuntutan kehidupan yang harus dijalani atas dasar kedisiplinan. Namun sayangnya, kekuasaan Soeharto ditakdirkan tidak akan bertahan tepat pada saat ia mencapai puncak kekuasaan.

Lambat laun, cengkraman rezim Soeharto terhadap masyarakat kian melonggar. Hal ini disebabkan karena Soeharto tidak dapat lagi mengandalkan sepenuhnya dukungan militer. Moerdani memang masih dipertahankan sebagai menteri pertahanan, namun hal ini juga menandakan bahwa Moerdani dipromosikan sebagai pemegang kekuasaan karena Soeharto yang kian renta itu tak lagi bisa memegang kendali akan militer secara langsung. Kekuasaannya telah menurun sejak lama, dan hubungan dengan Moerdani pun kian merenggang. Moerdani dikenal sebagai pelaksana rencana pembangunan-pembangunan Soeharto, namun ketika semua tujuan sudah terlaksana, musuh Bersama sudah tidak ada, Moerdani dan Soeharto kehilangan alasan untuk bekerja sama lagi. Soeharto

yang lekat dengan kejawaannya, sangat mencintai keluarganya. Ia sangat marah, ketika Moerdani mengkritik praktik bisnis anak-anaknya yang menuntut adanya keterbukaan yang besar dalam manajemen politik. Moerdani adalah jenderal kharismatik yang dianggap sebagai "raja Diraja". Karena ia memiliki kontak yang luas di seluruh negeri yang mendapat dukungan militer kuat. Karir militer anak didik Moertopo pun kian cemerlang dan menjadi orang-orang yang berpengaruh di masa nya.

Tetapi banyak kaum muslim yang merasa sakit hati dengan Moerdani. Karena ialah eksekutor terhadap operasi intelijen dalam menundukkan dan mengintimidasi kaum muslim. Terutama kejadian di Tanjung Priok. Maka, kaum muslim merasa gembira atas penugasan Tri Soetrisno sebagai panglima ABRI menggantikan Moerdani. Pertama kalinya ABRI di pimpin oleh muslim santri (Kasenda, 2013). Jika Moerdani lebih dipandang sebagai seseorang yang suka bekerja dibelakang layar dan dianggap penjahat. Tri Soetrisno dianggap sebagai orang yang bersahabat, dan menjadi pahlawan Islam santri bagi para pengikutnya.

Pada tingkat yang lebih luas masyarakat Indonesia telah berubah dari sejak Soeharto berkuasa. Masyarakat Indonesia lebih terdidik, lebih sehat, lebih tinggi mobilitasnya dan lebih sejahtera dibanding dengan keadaan tahun 1960. Pertumbuhan ekonomi menghasilkan kelas menengah yang besar dan kelas pekerja perkotaan meluas secara cepat. Mereka membaca surat kabar dan menonton TV (Kasenda, 2013). Namun mereka juga semakin sadar akan retorika di balik pemanfaatan demokrasi Pancasila, dimana militer menjadi titik pusat politik dibantu para teknokrat (Anggara, 2013). Mereka semakin kurang percaya terhadap

badan korporasi yang dianggap mewakili kepentingan mereka. Dapat dikatakan, Orde Baru mulai kehilangan koherensinya karena bentuk politiknya tidak mampu lagi menampung perubahan sosial selama dua dekade terakhir.

Menjelang tahun 1988 semakin banyak spekulasi mengenai estafeta kepemimpinan presiden selanjutnya. Soeharto telah kehilangan dukungan militernya. Lalu ia mulai menggunakan latar belakang Muhammadiyah. Dalam pidato-pidato nya, ia bercerita bagaimana ia dulu di besarkan dan diangkat sebagai anak angkat dari keluarga santri dan pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Tak lama setelah itu, ia menunaikan ibadah haji yang diberitakan dimana-mana. Oleh seorang pakar politik, langkah yang diambil oleh Soeharto ini memiliki implikasi ke arah rekonsiliasi politik nya yang menggaet umat muslim. Pada periode ini, Soeharto membuka tangan terhadap kaum muslim yang asalnya terbengkalai, ia merespon terhadap pembentukan ICMI (Kasenda, 2013).

Dukungan seperti ini meredakan oposisi muslim terhadap Soeharto pada masa akhir pemerintahannya. Berkat dukungan dari Soeharto, ICMI berhasil melebarkan sayapnya sampai ke tingkat daerah. Banyak aktivis sosial, kaum intelektual dan birokrasi yang ingin mendapatkan akses vertikal langsung keluar dengan menjadi anggota ICMI. Kebijakan yang pro Islam dengan cepat dikeluarkan pada periode ini seperti bank-bank yang islami, surat kabar Republika, majalah mingguan Ummat yang dipimpin oleh anggota ICMI dan rekrutmen nya dilakukan secara umum di pusat kampus-kampus yang mengadakan kegiatan ICMI. ICMI menjadi agenda yang penting bagi Soeharto dalam melaksanakan strategi

akomodasi kelas menengah muslim juga pada saat yang sama menghimpun juga memperkuat basis dukungan sosial bagi politik di dirinya sendiri.

Namun, keterbukaan akses yang dilakukan Soeharto terhadap cendekiawan muslim membuat ketegangan baru di dalam kehidupan bernegara. Banyak tokoh ICMI yang menduduki posisi penting di pemerintahan dan menjadi anggota parlemen sejak 1993. Pada saat yang sama, Soeharto berusaha menggilas habis pengaruh Moerdani di tubuh tentara dengan menempatkan jenderal-jenderal santri di Jabatan struktural militer. Manuver ini memposisikan Habibie yang sudah mempunyai kekuatan ICMI bertambah kuat dengan membangun basis militer yang berasal dari kaum santri. Namun, bukan Soeharto apabila membiarkan lokomotif kekuatannya tumbuh sendiri. Ia pun menciptakan pengimbang dengan menempatkan jenderal merah putih di berbagai posisi strategis di militer.

Dengan ICMI, Soeharto menciptakan kendaraan politik baru. Namun, hal ini juga menciptakan beberapa masalah. Diantaranya ICMI bukanlah organisasi Islam, banyak juga para cendekiawan ini yang mempertanyakan maksud Soeharto di balik pendirian ICMI. Walaupun Habibie menghimpun kekuatan umat muslim, namun Habibie bukan lah pemuka agama yang sudah teruji kredibilitasnya. Kedua, ICMI tidak memenuhi kriteria aspirasi politik berbagai agama di Indonesia. ICMI tidak plural, yang akhirnya mendorong terbentuknya organisasi cendekiawan dari agama lain.

Walaupun demikian, tujuan Soeharto adalah memobilisasi masa yang berkembang luas pengaruh nya di birokrasi selain dari Golkar dan ABRI. Pada akhirnya tidak ada satupun baik militer maupun ICMI yang dapat mengendalikan

Soeharto, yang ada kebalikannya. Soeharto akan melakukan apapun, menggaet siapapun dalam rangka melanggengkan kekuasaannya.

Adanya kehidupan perpolitikan yang lebih demokratis dengan menggaet umat muslim menjadi angan-angan saja. Soeharto selalu bertindak menekankan bahwa kehidupan perpolitikan di Indonesia harus dapat dikendalikan sesuai dengan kehendak ambisi politik nya (Zainuddin Djafar dalam Kasenda, 2013)

Sejalan dengan hal ini Gus Dur yang memiliki basis kuat di NU, membentuk suatu organisasi pluralisme dan demokratis Bernama Forum Demokrasi. Ketenaran Gus Dur sendiri membuat organisasi ini mendapat kepercayaan publik. Gus Dur bukanlah orang sembarangan yang dapat dibungkam oleh pihak Soeharto, Forum demokrasi yang didirikan nya berkampanye bukan hanya atas dasar partai yang namun juga memberi keseimbangan terhadap ICMI yang mendorong pemikiran sektarianisme. Semakin ditentang oleh Soeharto, forum demokrasi ini semakin populer menjelang pemilu 1992. Pada akhir Februari 1992 forum demokrasi membeberkan posisi politik nya yang berkomitmen dengan demokrasi dan suksepsi pemerintahan.

Forum demokrasi dipantau dengan serius oleh pihak Soeharto maupun dengan oleh pihak militer, karena Gus Dur menggunakan Pancasila sebagai tameng juga senjata untuk menjauhkan perpolitikan Indonesia dari sektarianisme pemerintah (Kasenda, 2013).

Soeharto melakukan upaya perdamaian dengan Gus Dur dan para pengkritik nya di kalangan pluralis karena imbauan DPR untuk melonggarkan kendali politik nya berhubungan dengan berakhirnya perang dingin dan tuntutan keterbukaan

politik yang kian membesar (Kasenda, 2013). Hal ini berimplikasi secara signifikan pada kebebasan media massa dan periode debat publik. Keterbukaan politik di cetuskan oleh Soemitro. Ia mengusulkan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD. DPR adalah lembaga yang berhak untuk membuat UU dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap wakil rakyat.

Dengan adanya kebebasan pers. Pembantaian demonstrasi di pemakaman *Santa Cruz* secara luas dan dikritisi (Kasenda, 2013). Dukungan basis terhadap rezim Soeharto kian menyurut, seiring dengan menguatnya perhatian Soeharto yang berlebihan pada bisnis anak-anaknya. Soeharto yang sangat perhatian terhadap keluarganya (Kasenda, 2013). Ia tak keberatan putra putrinya berkecimpung dalam dunia bisnis dan melihatnya sebagai alat yang tepat atas kebijakan pembangunannya. Semacam sebuah *back up*, Soeharto ingin memastikan apabila ia telah selesai menjadi penguasa di negeri ini, ia ingin anak-anaknya tetap berkecukupan dan berperan dalam sentral perpolitikan Indonesia.

Persengkongkolan bisnis, nepotisme tingkat tinggi, monopoli proyek negara, pungutan memaksa merupakan sebagian kecil gambaran umum kemajuan ekonomi luar biasa yang diraih putra putri Soeharto. Bank-bank pemerintah meminjamkan uang kepada mereka tanpa bunga demi memperoleh kemurahan hati politik. Keluarga Soeharto tega tanpa ampun memanfaatkan kedekatan tak tersaingi dengan pusat kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Terlebih lagi mereka memanfaatkan swastanisasi BUMN yang dapat mengucurkan kekayaan tak terhingga.

Sikap Soeharto yang sangat memanjakan anak-anaknya ini memiliki beberapa alasan (Kasenda, 2013). Secara psikologis kejawaannya, Soeharto lemah terhadap keluarganya. Asal usul Soeharto yang berasal dari keluarga sederhana membuatnya berkeyakinan untuk tidak membiarkan hal serupa terjadi pada keturunannya, yang lainnya berpendapat, intensitas masuknya keluarga Soeharto ada ranah bisnis dan ekonomi adalah bentuk jaminan mempertahankan pengaruh jika Soeharto tidak berpolitik lagi. Keberhasilan dramatis yang dicapai anak-anak Soeharto adalah karena hak-hak istimewanya dan monopoli kekuasaan.

Seakan bersiap atas segala situasi yang akan datang, anak-anak Soeharto bukan hanya mengembangkan bisnis di dalam negeri saja tetapi juga telah bergabung dengan berbagai perusahaan internasional yang kuat sejak Soeharto masih menjadi presiden (Kasenda, 2013). Maka, ketika Soeharto turun dari tahtanya, upaya-upaya untuk menjatuhkan konglomerasi keluarga sulit dilakukan, karena mereka berhadapan dengan mitra global yang sangat berpengaruh.

Pertumbuhan ekonomi selanjutnya dilakukan oleh orang-orang etnis Tionghoa. Struktur dan jaringan bisnis yang kuat yang telah ada sejak jaman kolonial adalah hal yang mengesankan. Soeharto yang seorang pragmatis melihat kenyataan potensi pengusaha Tionghoa. Ia memberikan kesempatan kepada para pengusaha Tionghoa untuk dapat berbisnis di Indonesia.

Disamping meroketnya bisnis yang dilakukan keluarga Soeharto, penguasa pribumi juga memiliki masa keemasan tersendiri (Kasenda, 2013). Masa boom minyak mewakili suatu fase dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang 40-60% dari total pendapatan negara. Selama masa ini, pemerintah mampu memainkan

peran dalam berbagai kegiatan ekonomi sebagai investor, regulator, pemain dan konsumen. Pendapatan dari minyak digunakan untuk mendanai berbagai proyek pemerintah. Melalui berbagai mekanisme, pemerintah mengalokasikan dana untuk para pengusaha pribumi.

Pembahasan mengenai korupsi yang dilakukan kroni Soeharto tak lengkap jika tak menyebutkan Soeharto sendiri. Soeharto adalah pribadi yang digambarkan tidak tamak, ia tak tertarik pada uang, yang tidak memberikan pengaruh apapun kepada nya. Ia tinggal di rumah yang nyaman dan bukan rumah yang pamer akan kemewahan. Minat Soeharto pada uang, karena uang itu adalah sumber kekuatan dalam mempertahankan kekuasaannya dan membawa Indonesia ke arah yang diinginkan. Kunci finansial Soeharto terletak pada yayasan-yayasan yang didirikannya. Yayasan ini memiliki jangkauan yang semakin luas yang memberikan pembiayaan ekstra yang tidak dapat diberikan negara untuk tujuan yang diinginkan.

Sebagai contoh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila pada tahun 1982, menghimpun dana untuk pembangunan masjid dan sarana Islam lainnya (Kasenda, 2013). Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, menjadi sumber dalam pembiayaan Golkar, mesin pencetak uang ini menyumbang ke berbagai lembaga itu sendiri. Seperti memberikan sumbangan kepada petani kecil. Ada kesan rahasia bahwa cengkraman Soeharto pada kekuasaan bukan pada senjata tetapi pada finansial.

Namun, jaringan tahan banting Soeharto ini kian meredup dipercepat dengan kematian istrinya, Siti Hartinah, pada 28 April 1996 (Kasenda, 2013). Ibu Tien memainkan peran aktif sebagai istri presiden dalam bisnis, kegiatan amal, kehidupan sosial dan pendamping Soeharto. Ia memiliki reputasi sebagai

penghimpun komisi yang gesit terhadap proyek-proyek negara. Ia menjadi mitra yang ideal bagi Soeharto karena mempunyai perangai yang cerdas, setia banyak akal, dan luar biasa kooperatif dalam mengakomodasi ambisi militer dan politik Soeharto. Ibu Tien menjadi perempuan ideal sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier yang ingin maju. Kematian nya secara mendadak merupakan pukulan besar bagi Soeharto.

Dalam budaya politik Jawa (Wibisono, 2020), pemimpin raja yang ideal adalah ia yang memerintah bersama istrinya. Jadi Soeharto, seyogyanya pantas untuk mundur seiring dengan kematian istrinya (Kasenda, 2013). Kematian ibu Tien berdampak pada musnahnya pengawasan atas kepentingan bisnis anak-anaknya. Tak ada lagi yang mengawasi anak-anak Soeharto, korupsi pun kian merajalela sampai Indonesia mendapat gelar negara paling korup di Asia pada 1997. Namun, kematian istrinya membuat Soeharto semakin berminat untuk mempertahankannya kekuasaannya yang diyakininya untuk kepentingan masa depan negerinya. Penampilannya yang penuh rasa percaya diri mengalihkan pembicaraan mengenai siapa yang akan menjadi wakilnya.

Secara mengejutkan Megawati Soekarnoputri berhasil menjadi ketua umum PDI pada tahun 1993 (Kasenda, 2013). Kesuksesan Megawati punya faktual sendiri dengan dukungan yang di berikan Moerdani, selepas ia dibuang oleh Soeharto. Moerdani berasumsi, dukungan politik kepada PDI akan meningkat apabila Megawati memimpin partai ditambah dengan popularitas besar ayahnya Soekarno diantara masa "wong cilik". PDI akan menjadi pengimbang Golkar dengan signifikan.

Bayang-bayang penghormatan terhadap Soekarno yang dilakukan masyarakat selalu menjadi hantu bagi Soeharto. Megawati dengan cepat menjadi oposisi, mengambil kekaguman rakyat dan dukungan koalisi intelektual liberal, mahasiswa radikal dan aktivis buruh. Megawati mempunyai harapan yang sangat tinggi agar PDI menang dalam pemilu 1997, dan Megawati akan menantang Soeharto dalam sidang umum MPR tahun 1998.

Pihak penguasa segera turun tangan mengambil alih gedung pusat PDI yang diduduki oleh Megawati (Kasenda, 2013). Tentara dan preman bayaran melakukan serangan konfrontasi yang menyebabkan tewasnya sejumlah penduduk PDI pada 27 Juli 1996. Akhirnya, Megawati terpaksa keluar dari kantor pusat dengan membayar mahal. Ia menjadi martir penindasan rezim Soeharto dan simbol orang miskin yang tergusur. Ia membuat pecahan partai PDI perjuangan yang diikuti oleh kelas menengah, para petani, masyarakat miskin, dan mahasiswa.

Kemudian, Presiden Soeharto dan managing director IMF menandatangani program bantuan keuangan yang memuat tujuh program perbaikan ekonomi pada 15 Januari 1998. Krisis keuangan yang terjadi, kemarau panjang tanpa hujan, menimbulkan gejolak ekonomi yang besar. Nilai tukar rupiah jatuh, beras, minyak gula terkena kenaikan harga sedangkan PHK terjadi dimana-mana. Demonstrasi mahasiswa berlanjut memprotes keadaan ekonomi yang terjadi.

Terjadi gerakan-gerakan progresif mahasiswa yang menyebut aktivitasnya adalah gerakan moral atas keprihatinan mengenai keadaan negara yang kian memburuk. Aksi mimbar bebas menuntut pemerintah mengatasi berbagai krisis yang sedang melanda.

Banyak aktivis kampus yang mendapat Sanksi dengan keterlibatan dalam aksi demonstrasi bahkan pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan mahasiswa yang dianggap terlalu berpolitik (Kasenda, 2013). Namun, hal ini justru mengibarkan api semangat para jajaran kampus dan mahasiswa untuk terus berafiliasi memprotes pemerintah. Banyak kampus terkemuka yang melakukan demonstrasi mahasiswa dan rektor nya.

Kejadian tewasnya empat mahasiswa Trisakti segera diikuti oleh kerusuhan masa yang terkesan terorganisir bergerak menuju pusat keramaian untuk melakukan kekerasan, menjarah, membakar dan memperkosa warga etnis Tionghoa. Kondisi sosial masyarakat yang kisruh dan penuh dengan kekacauan, juga ekonomi yang semakin menuju kehancuran, membuat Harmoko sebagai Ketum Golkar dan panglima militer pada saat itu mendatangi Soeharto dengan maksud menyampaikan bahwa sudah saatnya Soeharto secara elegan dan terhormat melepaskan kursi kekuasaannya.

Setelah 32 tahun lebih berkuasa. Soeharto dipaksa mundur dari gelanggang politik oleh kekuatan yang telah di bentuknya menjadi basis kekuasaan (Kasenda, 2013). Militer dan Golkar yang merupakan teman seperjuangan, kini berbalik menjadi pihak yang pertama memintanya mundur dari jabatannya presiden. Orang-orang kepercayaan nya berbalik menyerang tuannya sendiri.

Rezim Soeharto dalam bidang ekonomi erat kaitannya dengan hubungan dekat dengan pengusaha Tionghoa untuk memobilisasi modal yang besar, keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan berbagai proyek dan

perusahaan baru. Selama periode awal pemerintahannya, Soeharto fokus untuk menciptakan kelas pengusaha dan mengembangkan berbagai proyek pembangunan.

Hal-hal lain yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan era Soeharto adalah stabilitas rezimnya. Dominasi Soeharto di Indonesia selama lebih dari 32 tahun membuat kontinuitas pembangunan terkontrol. Stabilitas yang di dapat pada masa ini bersumber dari aliansi yang dibangun dan kemampuan Soeharto untuk memanipulasi koalisi tersebut (Kasenda, 2013).

Namun, krisis ekonomi secara bertubi-tubi menghantam Indonesia pada tahun 1997 akhir. Terjadi masalah pada kinerja bank yang buruk, penarikan besar-besaran dan pelarian modal ke luar negeri, korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh kroni Soeharto. Hal hal ini berdampak sangat serius pada kehidupan sehari-hari rakyat.

Soeharto mulai kehilangan satu persatu kemampuan di akhir-akhir tahun kekuasaannya, bahkan merugikan dirinya sendiri. Ia terlalu mencintai keluarganya sehingga hak-hak istimewa bisnis anak-anak Soeharto akhirnya harus dibayar mahal secara politik.

Rezim otoriter sering jatuh karena faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1997 menjadi sokongan stabilitas pemerintahan (Kasenda, 2013). Kemajuan ini terlihat secara gamblang pada tumbuhnya makro ekonomi yang kompeten, pertumbuhan produktivitas yang pesat dan pemanfaatan minyak yang efisien. Namun, krisis finansial menjelang tahun 1998 tak terhindar diduga akibat dari defisit fiskal, nilai mata uang mengalami krisis, yang pada akhirnya menghantam Indonesia dengan keras secara ekonomi. Indonesia melakukan

pertemuan dengan badan moneter internasional (IMF) untuk melakukan konsultasi dan penyelamatan pada tanggal 31 Oktober 1997. Pada saat yang sama Indonesia juga tidak mampu mempertahankan kebijakan melonggarkan nilai tukar rupiah dengan menariknya secara efektif dari pasar uang internasional.

Krisis ekonomi ini membangunkan "macan tidur", sebutan untuk gerakan mahasiswa yang selanjutnya menemukan momentumnya (Kasenda, 2013). Mahasiswa mulai melakukan tuntutan dengan mengangkat isu ekonomi dan penurunan harga, berlanjut dengan tuntutan bersifat politis diikuti dengan metode radikal. Gerakan mahasiswa ini terus membesar, Gerakan pun berubah arah menjadi kerusuhan; ribuan gedung terbakar, ratusan orang terpenggang.

Gerakan ini dimotori bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga guru besar, pekerjaan LSM, intelektual sampai dokter dan suster ini bersatu menghimpun gerakan yang sistematis dan progresif melampaui batas-batas dan ras dipersatukan oleh isu bersama menuntut perubahan politik dan sosial secara substansial. Sangat disayangkan, dalam waktu yang relatif singkat, gerakan ini menjadi kejadian huru hara, masa menjadi beringas dan semakin memperburuk krisis yang ada.

Tewasnya empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan sumbu yang meledakan suasana Jakarta menjadi medan perang saudara, Seruan menuntut turunnya Soeharto semakin menggema dari berbagai penjuru (Kasenda, 2013). Krisis multidimensi yang terus terjadi membuat Soeharto akhirnya mengalah dan pada tanggal 21 Mei 1998, ia menyatakan tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai presiden dan sesuai dengan pasal 8 UUD 45 estafeta kepemimpinan

dilanjutkan oleh BJ Habibie sebagai Presiden melanjutkan sisa waktu jabatan dari mandataris MPR 1998-2003.

2.3.8 Gaya Kepemimpinan Soeharto

Dalam sistem pemerintahan di dunia, ada dua kategori sebuah rezim, yaitu negara yang stabil karena tertutup dan negara yang stabil karena terbuka (Farchan, 2022). Dalam analisis Bremer dalam negara yang memakai sistem otoriter tertutup, kemungkinan stabil itu ada, bahkan kemungkinannya lebih tinggi diasing dengan negara yang demokratis. Sistem otoriter yang menggunakan kendali terpusat berfungsi sebagai peredam kejut yang menyerap guncangan secara efektif dan efisien (Farchan, 2022). Sebaliknya, dalam sistem demokrasi, kestabilan belum tentu didapatkan karena faktor keterbukaan. Namun, kestabilan pada rezim otoriter sangat bergantung terhadap sosok yang pribadi penguasa.

Begitulah sistem otoriter yang terjadi pada masa Soeharto, pusat kendali pemerintahan bergantung sepenuhnya terhadap arahan Soeharto. Ketika dia tak mampu mempertahankan kultus individu atau kehilangan sumber kekuatannya, maka rezim tersebut jatuh pada kondisi yang sangat kacau. Pun, hal tersebut menurut Bremmer disebabkan karena otoritarianisme mustahil bertahan lama, karena hasrat manusia adalah bergerak pada kebebasan dan perubahan (Farchan, 2022). Rakyat yang hidup dalam kendali represi pemerintah bagaikan bom yang akan meledak suatu waktu nanti. Hasrat akan kebebasan yang terpendam akan meledak tanpa terkendali.

Berbeda halnya dengan sistem otoritarianisme terbuka demokratis, dimana keterbukaan tidak menjamin kestabilan, namun pengekangan terhadap rakyat tidak

seperti pada rezim otoriter tertutup. Terdapat kebebasan dalam menyuarakan aspirasi dan jaminan atas kebebasannya.

Dalam konteks Indonesia, dibawah rezim Orde Baru pimpinan Soeharto Indonesia dikatakan sebagai negara yang stabil dari gejolak politik, sosial, ekonomi. Namun, akhir-akhir jabatannya di warnai kericuhan yang luar biasa. Ini menandakan, bahwa Soeharto menggunakan sistem otoriter tertutup dan terbuka.

Soeharto menggunakan sistem otoritarianisme pada masa pemerintahannya, berikut sumber-sumber kekuasaan yang mendasari sistem politik otoritarianisme tersebut:

a. Represif

Kekerasan yang dilakukan militer di bawah instruksi Soeharto bertujuan untuk membangun konsolidasi politik. Militer menjadi sarana pemerintah dalam mencapai stabilitas politik, kekuatan oposisi dibatasi dan aktivitas politik pemerintahan sebelumnya dihancurkan. Dalam menangani hal tersebut, pemerintah membentuk sejumlah badan untuk mengontrol pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur negara. Seperti BAKIN (Badan Koordinasi Intelegen), Kopkamtib (Komando Keamanan dan Ketertiban), Bakorstranas (Badan Koordinasi Strategis Nasional), Ditjensospol, Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) yang seluruhnya berhubungan erat dan berkoordinasi langsung berseberangan militer.

b. Kientelisme Ekonomi

Kekuatan kedua terbesar yang digunakan Soeharto dalam membangun pemerintahan Otoritarianisme adalah kekuatan material atau kientelisme ekonomi ini dapat berhasil dilakukan dengan suksesnya perdagangan ekspor impor Indonesia

dengan pihak luar negeri. Indonesia yang memiliki sumber energi yang melimpah, dan pada saat itu terjadi kenaikan harga minyak. Soeharto membuat sistem *money politic* untuk para elit yang ingin mendapat dukungan dan akses penuh dari pemerintah untuk menjalani bisnis. Intensif politik dari hasil ini ditawarkan kepada elit politik yang loyal. Sebaliknya, Soeharto memberlakukan pembatasan akses politik terhadap mereka yang berani menentang pemerintahan sebagai sanksi. Intensif-intensif ini dapat berupa keistimewaan dukungan politik, penguasaan berbagai proyek negara, keleluasaan untuk korupsi dll. Strategi ini terbukti sangat ampuh untuk membangun loyalitas elit politik.

c. Partikularistik

Definisi partikularistik misal terdapat pada demokrasi yang diberi nama demokrasi Pancasila, definisi mengenai hak-hak manusia, tanggung jawab negara dll. Definisi ini memuat moral politik pemerintah. Keabsahan kebijakan dibuat dengan memainkan standar moral dan bukan memperbaiki diri untuk memenuhi standar moral tertentu. Apabila politik represif (*management of fear*), dan klientelisme ekonomi adalah mekanisme kontrol terhadap perilaku politik, maka politik wacana dapat dikatakan sebagai mekanisme kontrol terhadap persepsi dan pola pikir masyarakat (partisipan politik).

Berdasarkan teori psikologi kepemimpinan, sifat *leadership* Soeharto distimulus oleh adanya peristiwa interaksi sosial. Artinya, jiwa kepemimpinan Soeharto bukan merupakan keturunan.

Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Soeharto merupakan gaya yang mampu menangkap peluang, menggunakannya dengan baik, mengambil tantangan,

serta memiliki visi yang jauh kedepan dan sadar mengenai perlunya menyiapkan langkah-langkah untuk merealisasikan tujuannya (Legowo et al., 2013).

Selama lebih dari tiga dekade kepemimpinan Soeharto diwarnai dengan praktik otoritarianisme, dimana militer menjadi sentral dominan. Militer menjadi kepanjangan tangan Soeharto dalam merealisasikan kebijakan yang dinamai secara represif atas nama negara. Terlihat jelas, dari penjelasan rinci sub bab sebelumnya bagaimana Soeharto menggunakan sistem yang otoriter, sentralistik dan dominan dalam pemerintahannya (Legowo et al., 2013).

Kekuatan dasar negara diletakan pada militer yang dipegang oleh Soeharto. Ia melakukan restrukturisasi secara sistematis untuk dalam rangka konsolidasi elemen-elemen kekuasaan agar dapat tercipta situasi politik yang stabil dan menjamin lancarnya pembangunan. Konsolidasi yang dilakukan oleh Soeharto membuat militer memiliki tempat yang sangat luas dalam ranah politik. Dominasi ini dimulai dengan diberikannya mandat kepada militer untuk memulihkan keamanan nasional juga dengan menyingkirkan kelas komunis secara radikal.

Pemerintahan yang bersifat sentralistik, terpusat kepada Soeharto membuat stabilitas mudah tercapai dan mempermudah kontrol terhadap kekuasaan yang ada dibawahnya atau di daerah.

Soeharto pun melakukan dominasi dalam partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat di monopoli secara sistematis dipusat pada Golkar yang tidak lain adalah orang-orang Soeharto. Begitupun berbagai pejabat birokrasi di pemerintahan daerah maupun organisasi kemasyarakatan diisi oleh secara menyeluruh oleh orang-orang yang membawa kepentingan Soeharto.

Sifat *leadership* yang otoriter pada masa awal kepemimpinannya merupakan hal yang tepat. Situasi Indonesia yang mengalami krisis dalam berbagai bidang membutuhkan sosok yang dominan dan kuat, namun seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 1980, gaya kepemimpinan seperti ini sudah tak lagi relevan dengan kondisi Indonesia yang sudah banyak berubah.

Soeharto juga memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat Exploitative-authoritative (Farchan, 2022) atau kurang demokratis. Soeharto adalah seseorang yang menerapkan gaya koersif, yaitu gaya yang ingin perintah atau instruksinya dipatuhi orang lain.

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menjadi acuan untuk dijadikan referensi oleh peneliti untuk keperluan penelitian dan menjadikannya contoh. Seperti berbagai karya tulis ilmiah maupun skripsi. Dengan kata lain, peneliti mengutip berbagai hal yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan beberapa persamaan dan perbedaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	(Oktaviani & Pramadya, 2019). " <i>Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli</i> ".	Dalam penelitian ini berfokus pada model negara kekuasaan pada zaman Orde Baru. Karena pemerintah pada masa orde baru pemerintah paham bahwa penguasaan informasi dan	Adapun adanya perbedaan yang ditemukan di dalam penelitian ini yakni terdapat 2 tokoh filsafat pemikiran yakni Hobbes dan filsafat Niccolo Machiavelli.	Adapun dengan persamaan dalam penelitian ini yakni adanya penelitian dengan pemikiran Niccolo Machiavelli

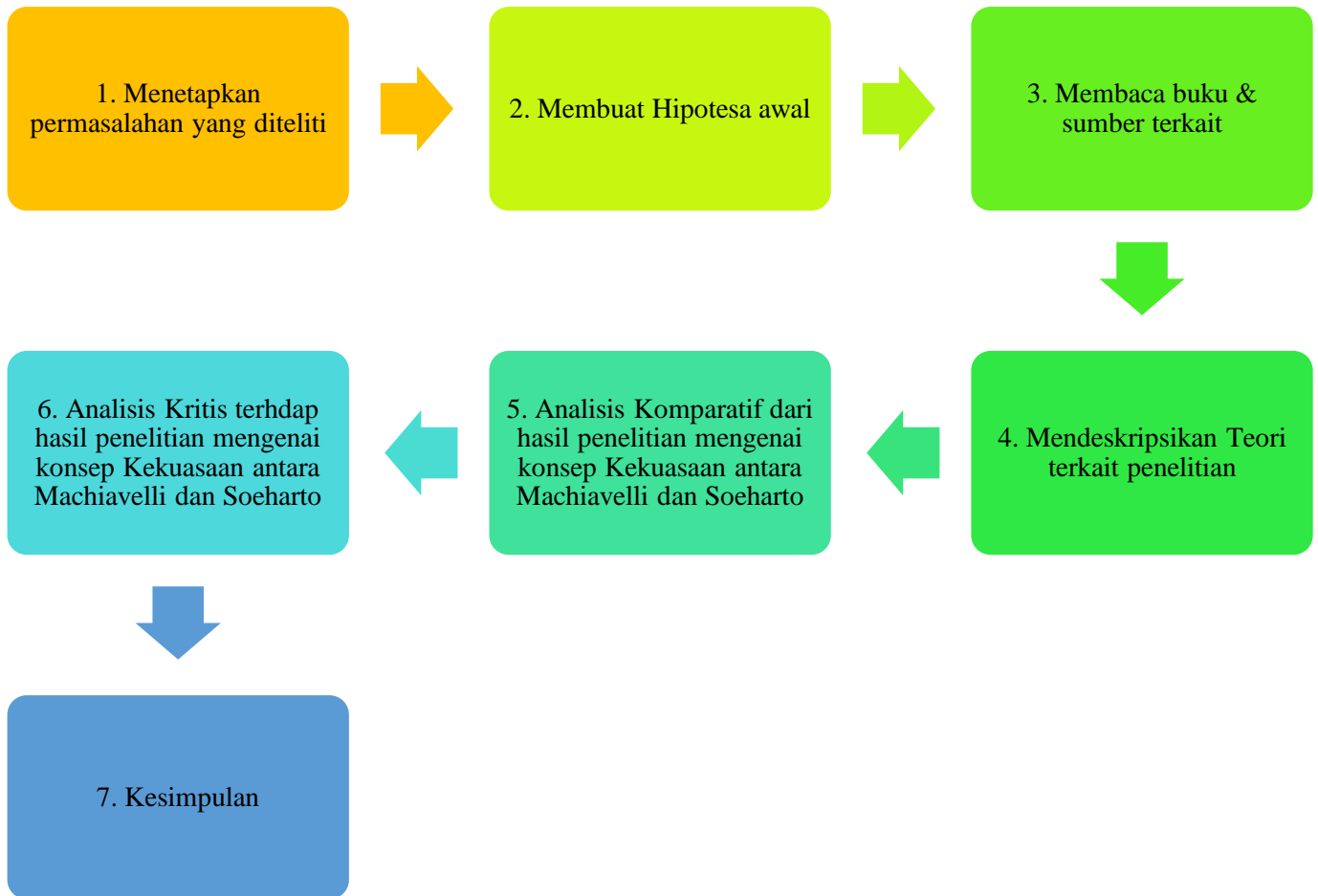
	Jurnal <i>Indonesia Perspective</i> , 175-190	peningkatan citra sangat signifikan perannya.		tentang negara dan kekuasaan.
2	(Sumanto, 2017). “ <i>Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komparatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)</i> ”. Jurnal <i>El-Afkar</i> , 1-12.	Pemikiran dua tokoh tersebut, terletak dari kondisi agama, wawasan dan lingkungan yang ikut mewarnai konsep politik yang di tulis dan diajarkannya dengan mempunyai tujuan ingin membentuk perpolitikan yang sangat baik bagi negara untuk mengatur kehidupan warganya.	Dengan adanya perbedaan yakni mengenai pada penelitian ini adalah dari tokoh pemikiran filsafat politik Al Farabi dengan Thomas Aquinas, yang membahas mengenai kondisi agama, wawasan dan lingkungan dengan mewarnai konsep politik yang diajarkannya	Adapun terdapat persamaan ini dengan penelitian yakni membahas mengenai pemikiran filsafat.
3	(Fatra, 2015). “ <i>Konsep Negara Menurut Niccolo Machiavelli Dalam Tinjauan Filsafat Politik</i> ”. Skripsi Widya Mandala Catholic University.	Dalam isi penelitian tersebut mengenai negara yang ekspansif yang bertujuan untuk menundukkan serta melemahkan negara-negara yang lain demi kekuasaan.	Adapun dengan adanya mengenai perbedaan dalam penelitian ini yakni, hanya terdapat tentang konsep Negara yang dijelaskan oleh Machiavelli	Dengan adanya persamaan yakni dalam penelitian ini membahas terhadap sebuah pemikiran filsafat yakni menurut Machiavelli yang sama-sama menjelaskan tentang negara.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yakni setiap bagian maupun tahapan-tahapan dapat dilakukan terhadap penelitian yang ada di dalamnya. Yang terkandung diantaranya latar belakang, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam latar belakang masalah menjelaskan mengenai pemikiran Machiavelli terhadap kejadian di Indonesia lebih tepatnya pada zaman Orde Baru. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep negara dan kekuasaan menurut Machiavelli mengenai negara Indonesia.

Dalam tinjauan pustaka penulis membahas mengenai konsep pemikiran politik barat yakni Niccolo Machiavelli mengenai filsafat politik sebagai referensi yang menjadi standarisasi terhadap penelitian tersebut. Adapun dalam pengertian ilmu politik yang menjadi dasar analisis yang ada di tinjauan pustaka dengan mendapatkan serta mampu menjelaskan tentang bagaimana konsep negara dan kekuasaan di Indonesia pada zaman Orde Baru yang akan di jelaskan mengenai penelitian tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian fokus penelitian, pendekatan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan objek yang hendak akan diteliti adapun analisis data dan validitas data untuk mengetahui keabsahan data, kemudian analisis data untuk menganalisis isi dari pemikiran politik Machiavelli yang menjelaskan tentang negara dan kekuasaan di era Orde Baru tepatnya pada saat kepemimpinan Soeharto.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran